

**IMPLEMENTASI NORMALISASI HUBUNGAN  
DIPLOMATIK UNI EMIRAT ARAB DENGAN ISRAEL  
PADA TAHUN 2020**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya untuk  
Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial  
(S.Sos.) dalam Bidang Hubungan Internasional**



**Oleh:**

**FERYAN AIRLANGGA**

**NIM I02217009**

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**

**JULI 2022**

## PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : FERYAN AIRLANGGA

NIM : I02217009

JUDUL : IMPLEMENTASI NORMALISASI HUBUNGAN  
DIPLOMATIK UNI EMIRAT ARAB DENGAN ISRAEL  
PADA TAHUN 2020

Dengan ini menyatakan bahwa:

- 1) Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan pada lembaga pendidikan manapun untuk mendapatkan gelar akademik apapun.
- 2) Skripsi ini benar-benar hasil karya saya secara mandiri dan bukan plagiasi terhadap karya orang lain.
- 3) Apabila skripsi ini dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan sebagai hasil plagiasi, saya bersedia bertanggung jawab sesuai hukum yang terjadi.

Surabaya, 1 Juli 2022



METERAI  
TAMPEL  
6C7CLAKX574154616  
Feryan Airlangga

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Setelah melakukan proses pembimbingan dalam penulisan skripsi yang ditulis oleh:

**NAMA : FERYAN AIRLANGGA**

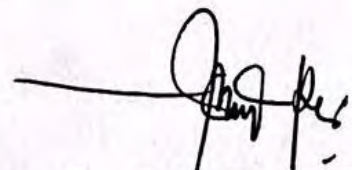
**NIM : 102217009**

**PROGRAM STUDI : HUBUNGAN INTERNASIONAL**

Yang berjudul: **Implementasi Normalisasi Hubungan Diplomatik Uni Emirat Arab dengan Israel pada Tahun 2022**, saya berpendapat bahwa skripsi ini dapat diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Hubungan Internasional

**Surabaya, 1 Juli 2022**

**Dosen Pembimbing**



**Dr. Abid Rohman, M.Pd.I.**

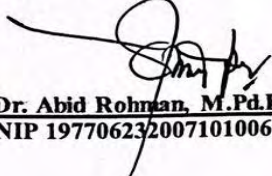
**NIP 197/06232007101006**

**PENGESAHAN**

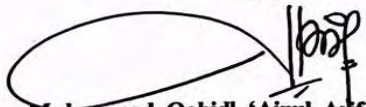
Skripsi oleh Feryan Airangga dengan judul: "Implementasi Normalisasi Hubungan Diplomatik Uni Emirat Arab dengan Israel Pada Tahun 2020" telah dipertahankan dan dinyatakan lulus di depan Tim Penguji Skripsi pada tanggal 12 Juli 2022.

**TIM PENGUJI SKRIPSI**


**Penguji I**

  
Dr. Abid Rohman, M.Pd.I.  
NIP 197706232007101006

**Penguji II**

  
Muhammad Qobidl 'Aimul Arif, S.IP., M.A.  
NIP 198408232015031002

**Penguji III**

  
Zaky Ismail, M.SI.  
NIP 198212302011011007

**Penguji IV**

  
Nur Luthfi Hidayatullah, S.IP., M.Hub.Int.  
NIP 199104092020121012

Surabaya, 25 Juli 2022

Mengesahkan,

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dekan

  
Dr. Abdul Chalik, M.Ag.  
NIP 197306272000031002



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Feryan Airlangga  
NIM : I02217009  
Fakultas/Jurusan : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/Hubungan Internasional  
E-mail address : gensavna@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :  
 Sekripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**IMPLEMENTASI NORMALISASI HUBUNGAN DIPLOMATIK UNI EMIRAT ARAB  
DENGAN ISRAEL PADA TAHUN 2020**


beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 15 Juli 2022

Penulis

  
(Feryan Airlangga)

## ABSTRACT

**Feryan Airlangga**, “Implementation of the United Arab Emirates Diplomatic Relations with Israel in 2020.” Thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022.

**Keywords:** Normalization, United Arab Emirates, Israel

*The normalization of diplomatic relations between the United Arab Emirates and Israel, namely the Abraham Accords, aims to establish cooperation in various fields of people's lives. This study uses a qualitative approach with data analysis techniques using descriptive methods. The data is obtained from literature study. The results of this study indicate that the implementation of the normalization of diplomatic relations between the United Arab Emirates and Israel in 2020 includes maritime cooperation through DP World and Dubai Customs company contracts to Israel; Civil aviation cooperation through flight route renewal and service sharing; Economic cooperation through free trade; Defense cooperation through the purchase of military and intelligence technology; Educational cooperation through student exchanges, educational programs and activities; Health cooperation through technical control of the handling of the Covid-19 pandemic and cooperation in space exploration through the development of space scientific instruments.*

## ABSTRAK

**Feryan Airlangga**, “Implementasi Hubungan Diplomatik Uni Emirat Arab dengan Israel Pada Tahun 2020.” Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022.

**Kata Kunci:** Normalisasi, Uni Emirat Arab, Israel

Normalisasi hubungan diplomatik antara Uni Emirat Arab dengan Israel yang diberi nama *Abraham Accords* bertujuan untuk mewujudkan kerja sama berbagai bidang kehidupan masyarakat. Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif dengan teknik analisis data menggunakan metode deskriptif. Data yang diperoleh berasal dari studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi normalisasi hubungan diplomatik Uni Emirat Arab dengan Israel pada tahun 2020 diantaranya kerjasama maritim melalui kontrak perusahaan DP World dan Dubai Customs terhadap Israel; Kerjasama penerbangan sipil melalui pembaharuan rute penerbangan dan berbagi layanan; Kerjasama ekonomi melalui perdagangan bebas; Kerjasama pertahanan melalui pembelian teknologi militer dan intelijen; Kerjasama pendidikan melalui pertukaran pelajar, program dan kegiatan pendidikan; Kerjasama kesehatan melalui teknis pengendalian penanganan pandemi Covid-19 serta kerjasama eksplorasi ruang angkasa melalui pengembangan instrumen ilmiah ruang angkasa.

## DAFTAR ISI

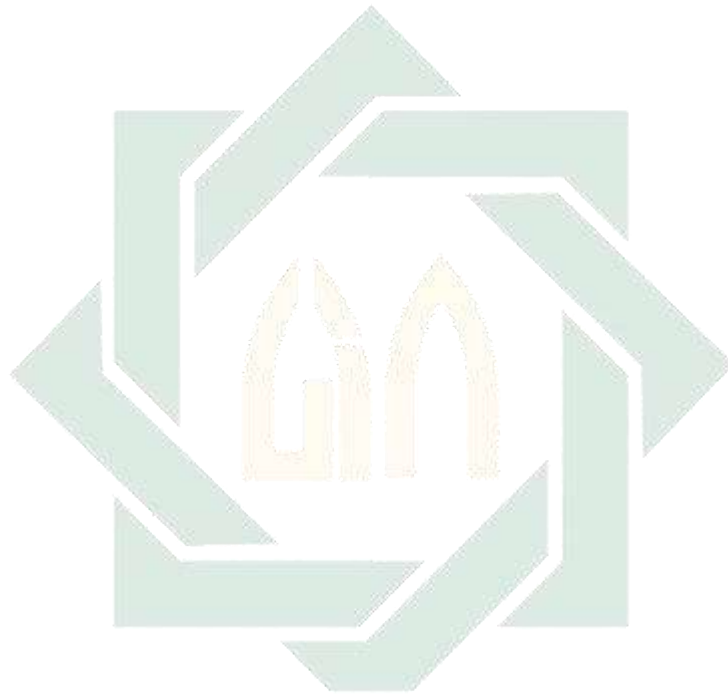
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	i
<b>PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>MOTTO</b> .....	iii
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN SKRIPSI</b> .....	vi
<b>LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	vii
<b>ABSTRACT</b> .....	viii
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xii
<b>BAB I</b> .....	1
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>A. Latar Belakang</b> .....	1
<b>B. Fokus Penelitian</b> .....	9
<b>C. Tujuan Penelitian</b> .....	10
<b>D. Penelitian Terdahulu</b> .....	10
<b>E. Batasan Masalah</b> .....	17
<b>F. Argumntasi Utama</b> .....	18
<b>G. Sistematika Penulisan</b> .....	18
<b>BAB II</b> .....	21
<b>LANDASAN KONSEPTUAL</b> .....	21
<b>A. Konsep Implementasi</b> .....	21
<b>B. Konsep Normalisasi Hubungan Diplomatik</b> .....	23
<b>BAB III</b> .....	33
<b>METODE PENELITIAN</b> .....	33
<b>A. Pendekatan Penelitian dan Jenis Penelitian</b> .....	33
<b>B. Tingkat Analisis</b> .....	34
<b>C. Teknik Pengumpulan Sumber Data</b> .....	35
<b>D. Teknik Analisis Data</b> .....	36





## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumen Abraham Accords .....	90
--	----



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Salah satu subjek hukum internasional adalah negara. Negara memiliki hak dalam menentukan hubungan internasional dengan negara lainnya dalam berbagai bidang kehidupan. Seiring dengan perkembangan pengetahuan dan teknologi yang menuntut suatu negara meningkatkan kualitas negaranya adalah dengan bekerja sama terhadap negara lain yang mempunyai kelebihan dalam suatu bidang. Sehingga yang menjadi kebutuhan bagi setiap negara adalah melakukan hubungan diplomatik dalam menjalin kerja sama.<sup>1</sup>

Hubungan diplomatik merupakan hubungan yang dilakukan oleh negara satu dengan negara lain dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan negaranya masing-masing. Hal yang harus dilakukan sebelum menjalin hubungan diplomatik adalah negara memerlukan pengakuan terhadap negara lain yang akan menerima perwakilan diplomatik tersebut. Sehingga hubungan diplomatik ini dapat tercipta apabila kedua negara tersebut mempunyai hubungan kerjasama yang berpotensi baik bagi masing-masing negara dengan dibuktikan melalui pembukaan kantor kedutaan serta pengiriman duta besar sebagai perwakilan atas persetujuan mengadakan hubungan diplomatik tersebut.<sup>2</sup> Jika sebaliknya, suatu negara tidak mengakui terhadap negara lain maka hubungan

---

<sup>1</sup> Raden Mas Try Ananto Djoko Wicaksono, "Analisis Kebijakan Uni Emirat Arab dalam Normalisasi Hubungannya dengan Israel," *Jurnal Middle East and Islamic Studies (MEIS)*, Volume 7, No.2 (2020): 2.

<sup>2</sup> Wagiman dan Anasthasya Saartje Mandagi, *Terminologi Hukum Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 163-164.

diplomati tersebut tidak dapat dilakukan. Misalnya, negara Indonesia belum mengakui Israel sebagai suatu negara, maka keduanya tidak dapat menjalankan hubungan diplomatiknya.

Pada awal berdirinya UEA, presiden pertama UEA dengan jelas mengatakan bahwa Israel adalah ancaman keamanan dan musuh. Ini menunjukkan dukungan UEA untuk keputusan Liga Arab dan Dewan Kerjasama Teluk tentang Israel. Sebagai anggota Liga Arab, UEA menolak untuk mengakui keabsahan Negara Israel, di samping banyak boikot UEA lainnya seperti pemblokiran maskapai penerbangan dan nomor telepon dan larangan resmi masuknya orang Israel ke wilayahnya. Wilayah menurut boikot umum Israel oleh Liga Arab.

Pada Januari 2010 pembunuhan pemimpin Hamas Mahmoud al-Mabhouh di sebuah hotel di Dubai. Pembunuhan ini menyebabkan memburuknya hubungan antara Uni Emirat Arab dan Israel sebagai akibat dari kecurigaan bahwa Mossad Israel terlibat dalam pembunuhan ini. Dalam hal ini, Israel tidak membenarkan atau membantah tuduhan tersebut, sehingga sikap yang dikeluarkan Israel mendorong UEA untuk mengambil beberapa tindakan. Israel di Timur Tengah adalah satu-satunya negara non-Muslim, sehingga UEA yang lahir sebagai negara dengan latar belakang Islam tumbuh sebagai negara dengan opini. Tegas bahwa Israel adalah Zionis Yahudi sebagai musuh Islam.

Ancaman keamanan yang ditimbulkan oleh Israel di Timur Tengah seringkali dikaitkan dengan perjuangan untuk membebaskan Palestina dari Israel.<sup>3</sup>

Namun ancaman keamanan yang ditimbulkan oleh Israel mulai menghilang di Timur Tengah, khususnya UEA sendiri. Hal itu terlihat dari normalisasi hubungan UEA dengan Israel melalui Kesepakatan Abraham pada 15 September 2020 di halaman Gedung Putih. Kesepakatan Abraham adalah kerja sama antara Uni Emirat Arab dan Israel untuk membangun hubungan ekonomi dan diplomatik bilateral penuh, yang dikenal sebagai “normalisasi”.

Wilayah Timur Tengah adalah kawasan yang tidak pernah sepi dengan pemberitaan baik media lokal maupun media internasional. Ini karena Timur Tengah adalah kawasan yang penting dan strategis di dunia sehingga penuh dengan gejolak politik. Posisinya yang terhubung oleh benua Asia, Afrika dan Eropa menjadikan kawasan ini menjadi target untuk diperebutkan oleh aktor-aktor yang berkepentingan di dalamnya. Maka sangat wajar ketika seluruh dunia melabelkan wilayah Timur Tengah dengan wilayah panas yang sibuk dengan konflik yang tidak pernah usai. Perseteruan konflik Palestina dan Israel misalnya, konflik yang sudah berlangsung lebih dari 70 tahun yang hingga saat ini belum terselesaikan.<sup>4</sup>

Secara historis, kehadiran wilayah Timur Tengah menjadi sangat penting bagi negara-negara yang memiliki kepentingan atasnya. Pergantian kekuasaan politik dari satu dinasti ke dinasti yang lain dan okupasi wilayah

---

<sup>3</sup> UAE Official Government, Federal Law No. 15/1972 of the United Arab Emirates concerning the Boycott of Israel, UAE Federal Law No. 15/1972, 1972.

<sup>4</sup> Ari Heistein & Yoel Guzansky, “The benefits and challenges of UAE-Israel normalization.” *Journal Middle East Institute* (2020): 2.

yang dilakukan oleh penguasa kepada wilayah lain menjadi pemandangan yang biasa. Dinamika ini menjadi bukti bahwa wilayah ini adalah penting dan strategis baik secara ekonomi maupun politik. Warisan konflik perebutan berbagai sumber daya yang ada di Timur Tengah, baik sumber daya ekonomi maupun politik sampai hari ini masih terjadi. Secara umum konflik di kawasan Timur Tengah memiliki tipologi konflik yang bisa dibagi ke dalam beberapa macam, yaitu konflik perebutan sumber minyak, konflik sosial politik, dan konflik Ideologi.<sup>5</sup>

Peta geopolitik Timur Tengah setelah normalisasi hubungan diplomatik antara Uni Emirat Arab dan Israel. Hal ini juga ditawarkan kepada negara-negara Arab lainnya untuk melakukan normalisasi dengan Israel melalui mediasi Amerika Serikat. Pergeseran besar dalam geopolitik Timur Tengah dilambangkan dengan adanya *Abraham Accords* tentang penolakan negara-negara Teluk Arab dalam melakukan perundingan bersama dengan Israel. Sehingga dengan *Abraham Accords* ini mewakili perubahan besar yang mengubah ancaman Israel menjadi daya tawar yang tinggi dalam melakukan kerjasama di Timur Tengah.<sup>6</sup>

Dalam konteks hubungan antara negara Uni Emirat Arab (UEA) dengan Israel pada tanggal 13 Agustus 2020 yang telah memunculkan suatu perdamaian dan kesepakatan baru yang diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat, yakni

---

<sup>5</sup> Moran Zaga "Israel and the United Arab Emirates: Opportunities on Hold" *MIVTIM The Israel Institute for Regional Foreign Policies* (Desember 2018): 1-17.

<sup>6</sup> Tova Norlen dan Tamir Sinai, "The Abraham Accords: Paradigm Shift or Realpolitik?" *Security Insights*, The George C. Marshall European Center for Security Studies, ISSN 1867-4119 No. 64, (Oktober, 2020), 1

Donald Trump, pengumuman tersebut berisi normalisasi hubungan Uni Emirat Arab (UEA) dengan Israel yang diberi nama “Kesepakatan Abraham atau *Abraham Accords*”.<sup>7</sup> Istilah normalisasi yang digunakan dalam ranah politik internasional pada era saat ini merupakan sebuah konsep dalam hubungan diplomatik suatu negara untuk mewujudkan kesepakatan dan kerja sama dengan tujuan mencari resolusi konflik melalui beberapa alternatif penyelesaian.

Bentuk kesepakatan tersebut telah diwakili oleh pihak Uni Emirat Arab yaitu Presiden Khalifa bin Zayed Al Nahyan, (berinisial MBZ), sedangkan dari Israel diwakili oleh Benjamin Netanyahu selaku Perdana Menteri. Kedua negara tersebut diharapkan dapat bertukar kedutaan dan memulai kerja sama dalam berbagai bidang kehidupan negara.<sup>8</sup>

Uni Emirat Arab melakukan normalisasi hubungan dengan Israel dan menjadi negara setelah Mesir dan Yordania, serta Uni Emirat Arab menjadi negara Teluk pertama yang mendeklarasikan hubungan aktifnya dengan Israel. Namun, normalisasi yang dilakukan oleh Uni Emirat Arab dan Israel ini berbeda dengan normalisasi yang dilakukan oleh Mesir dan Yordania, perbedaan tersebut atas dasar prinsip perdamaian dengan imbalan tanah yang telah diduduki Israel pada tahun 1967. Perjanjian bilateral antara Uni Emirat Arab dengan Israel lebih merujuk pada kepentingan keamanan yang disebabkan oleh masalah Iran, serta membahas tentang kepentingan ekonomi, dan strategis.

---

<sup>7</sup> Raden Mas Try Ananto Djoko Wicaksono “Analisis Kebijakan Uni Emirat Arab dalam Normalisasi Hubungannya dengan Israel,” *Jurnal Middle East and Islamic Studies (MEIS)*, Volume 7, No.2 (2020): 3.

<sup>8</sup> Raden Mas Try Ananto Djoko Wicaksono “Normalisasi Hubungan Uni Emirat Arab dengan Israel: Kepentingan Nasional Versus Solidaritas Negara Muslim terhadap Palestina,” *Jurnal Indonesia Center for Middle East Studies (ICMES)*, Volume 4, No.2, (2020): 3.

Normalisasi antara Uni Emirat Arab dan Israel dilakukan secara bertahap dengan campur tangan negara Amerika Serikat, hal ini merupakan bagian dari hubungan diplomatik yang lebih luas dalam upaya perundingan kesepakatan damai dengan Israel. Pengumuman yang disampaikan oleh Donald Trump di Gedung Putih pada tanggal 4 September 2020 menyatakan bahwa Uni Emirat Arab dengan Israel berkomitmen untuk normalisasi hubungan dengan mengambil langkah-langkah diplomatik.<sup>9</sup>

Sumber daya Uni Emirat Arab dikenal memiliki kekuatan ekonomi dan Islam moderatnya sebab keterlibatannya yang meningkat dalam pembangunan regional di seluruh dunia. Dalam mewujudkan perdamaian Arab, Uni Emirat Arab meningkatkan aktivitas kebijakan luar negerinya dalam beberapa tahun terakhir dengan memimpin dan menyerukan penerapan solusi kemajuan untuk mencapai perdamaian., termasuk konflik Israel-Palestina. Keanggotaan Uni Emirat Arab dalam berbagai forum negara Arab menentukan sebagian besar kebijakan luar negerinya dan memiliki fleksibilitas relatif dalam keputusan normalisasi tersebut.<sup>10</sup>

Keputusan berdaulat Uni Emirat Arab yang menjadi tanggung jawabnya dalam menormalkan hubungan dengan Israel ini didorong oleh pemikiran dan keinginan orang-orang terkuatnya, seperti Mohammad bin Zayed (MBZ) yang ingin memulai kerja sama dengan Israel dalam bidang keamanan terutama yang

---

<sup>9</sup> Ikhwanul Kiram Mashuri, "Geopolitik Timteng Berubah: Berdamai dengan Israel," <https://www.republika.co.id> (2020).

<sup>10</sup> Raden Mas Try Ananto Djoko Wicaksono, "Normalisasi Hubungan Uni Emirat Arab dengan Israel: Kepentingan Nasional Versus Solidaritas Negara Muslim terhadap Palestina." *Jurnal Indonesia Center for Middle East Studies (ICMES)*, Volume 4, No.2 (2020): 4.

berkaitan dengan masalah dunia maya. Sebagai upaya dalam mendukung keputusan normalisasi hubungan Uni Emirat Arab dengan Israel, Amerika Serikat menjadi tuan rumah pertemuan kedua negara tersebut, sehingga forum trilateral antara UEA, Israel, dan AS untuk memperkuat kerja sama dan berkoordinasi terkait bidang keamanan, serta melakukan penelitian dan berkolaborasi dalam proyek medis terkait pandemi Covid-19. Namun, berkaitan dengan normalisasi kedua negara tersebut, negara tetangga memberikan respon yang berbeda.

Beberapa negara menganggap bahwa normalisasi sebagai cara yang positif dalam mewujudkan perdamaian dan keamanan negara, namun tidak sedikit negara yang mengkritik bahkan menolak secara penuh atas keputusan Uni Emirat Arab menormalkan hubungannya dengan Israel.<sup>11</sup>

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>11</sup> Ari Heistein & Yoel Guzansky, "The benefits and challenges of UAE-Israel normalization." *Journal Middle East Institute* (2020): 3.





Dalam menghindari ancaman-ancaman yang rawan terjadi di negara Timur Tengah, Uni Emirat Arab melakukan normalisasi dengan Israel dengan bantuan Amerika Serikat. Sebab Timur Tengah adalah kawasan yang paling vital di dunia karena mempunyai sumber daya alam terutama energi sebagai pemasok terbesar di dunia. Negara-negara Teluk di Timur Tengah juga menjadi negara dengan persentase 20% sebagai pemasok energi tersebut. Selain itu, negara-negara di Timur Tengah sebagai pembeli senjata terbesar di dunia. Berdasarkan data terdahulu, dalam konflik di Timur Tengah pada tahun 2019 yakni terjadi perang *drone* dan tanker, dimana konflik tersebut dilatarbelakangi oleh serangan *drone* pemberontak Houthi di Yaman, yang didukung oleh Iran dengan sasaran di selatan Arab Saudi, termasuk bandara di Jizan dan Abha dan jaringan pipa minyak sepanjang 1.200 kilometer.<sup>13</sup>

Dengan memperhatikan beberapa aspek yang dipaparkan pada latar belakang di atas, peneliti berasumsi bahwa implementasi normalisasi hubungan diplomatik Uni Emirat Arab dengan Israel memiliki arti penting bagi pihak-pihak yang ikut serta didalamnya, termasuk bagi negara Uni Emirat Arab dalam mewujudkan kesejahteraan regional. Oleh karena itu, studi penelitian memiliki tujuan untuk mendeskripsikan implementasi normalisasi hubungan diplomatik Uni Emirat Arab dengan Israel pada tahun 2020.

## **B. Fokus Penelitian**

---

<sup>13</sup> Poltak Partogi Nainggolan. Perang Drone dan Tanker di Timur Tengah, Info Singkat Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Vol. XI, No.15/I/Puslit/Agustus/2019: 7-12.

Berdasarkan latar belakang yang telah dideskripsikan di atas, maka peneliti memutuskan untuk menggunakan fokus kajian yaitu: “Bagaimana implementasi normalisasi hubungan diplomatik Uni Emirat Arab dengan Israel pada tahun 2020?”

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan manfaat bagi para pembaca, baik dari segi manfaat akademis maupun manfaat praktis.

#### **1. Manfaat Akademis**

Secara akademis, penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi referensi pada penelitian selanjutnya dan menambah atau memperbanyak kajian yang berkaitan dengan ilmu hubungan internasional, serta dapat memberikan sumbangan, pemikiran, konsep-konsep, maupun teori terhadap program studi Hubungan Internasional.

#### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca secara langsung ketika berada di lapangan.

### **D. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu digunakan oleh peneliti untuk memetakan perbedaan dan persamaan penelitian guna memunculkan inspirasi baru dan menunjukkan keaslian penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Diantara penelitian terdahulu yang selaras dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ben Smith, “*The diplomatic deals between Israel and the UEA and Bahrain*” merupakan jurnal penelitian yang diterbitkan pada tanggal 15 Oktober 2020 oleh *House of Commons Library*. Jurnal yang ditulis oleh Ben Smith ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan fokus pembahasan latar belakang terjadinya normalisasi dan perspektif negara-negara Timur Tengah terhadap perjanjian hubungan diplomatik Uni Emirat Arab dan Israel. Selain itu, jurnal ini menjelaskan tentang reaksi negara-negara tetangga terhadap normalisasi hubungan yang dilakukan oleh Uni Emirat Arab dengan Israel. Sehingga tanggapan tersebut ada yang berupa pro dan juga kontra.<sup>14</sup> Penelitian yang dilakukan oleh Ben Smith dengan peneliti memiliki kesamaan subjek yakni Uni Emirat Arab dan Israel, namun memiliki perbedaan pada obyek penelitian yang mana peneliti mengambil implementasi normalisasi dari sudut pandang Uni Emirat Arab.
2. Mahjoob Zweiri, “*The UEA-Israel Normalisation “If you can’t convince them, confuse them” Gulf Insight Series, College of Arts and Sciences* yang diterbitkan pada bulan Agustus 2020. Jurnal yang ditulis menggunakan metode penelitian kualitatif ini berfokus pada masalah mengapa Uni Emirat mengejar kesepakatan yang dianggap kontroversial. Kesimpulan yang dapat ditarik dari jurnal ini adalah faktor terjadinya normalisasi hubungan antara Uni Emirat Arab dengan Israel karena tujuan strategis mereka untuk menahan Iran di kawasan tersebut, sehingga hal ini dilakukan karena

---

<sup>14</sup> Ben Smith, *The diplomatic deals between Israel and the UAE and Bahrain* (House of Commons Library, 2020), 1-6.











dengan Israel yang berkaitan dengan isu-isu Palestina, sedangkan peneliti berfokus mengkaji tentang implementasi normalisasi hubungan diplomatic dari sudut pandang Uni Emirat Arab.

9. Raden Mas Try Ananto Djoko Wicaksono dengan judul “Analisis Kebijakan Uni Emirat Arab dalam Normalisasi Hubungannya Dengan Israel” yang diterbitkan oleh Jurnal *Middle East and Islamic Studies* (MEIS) Volume 7, Nomor 2, 2020. Jurnal ini ditulis dengan pendekatan penelitian kualitatif yang membahas kepentingan Uni Emirat Arab terhadap Israel serta respon-respon negara muslim terkait dengan kebijakan tersebut. Permasalahan ini dikaji menggunakan teori kepentingan nasional dan konsep realpolitik dengan hasil yang menunjukkan bahwa Israel dan Uni Emirat Arab memiliki kepentingan yang sama dalam memperluas kerjasama antar kedua negara di berbagai bidang khususnya pada politik-keamanan, sebagai respon untuk menghadapi ancaman Iran.<sup>22</sup> Persamaan penelitian tersebut dengan milik peneliti adalah metode penelitian kualitatif yang digunakan, sedangkan perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh Raden Mas Try dengan peneliti yakni terletak pada fokus kajian, Raden Mas Try Ananto Djoko Wicaksono menekankan pada kepentingan Uni Emirat Arab terhadap Israel dan respon negara-negara muslim. Sedangkan peneliti menekankan pada implementasi normalisasi dari sudut pandang Uni Emirat Arab.

---

<sup>22</sup> Raden Mas Try Ananto Djoko Wicaksono, “Analisis Kebijakan Uni Emirat Arab dalam Normalisasi Hubungannya Dengan Israel”. *Jurnal MEIS* Volume 7, Nomor 2 (2020): 132-154.

10. Mr. Engel yang berjudul “*Supporting the announcement of establishment of full diplomatic relations between the State of Israel and the Uni Arab Emirates and the State of Israel and the Kingdom of Bahrain, and for other purpose*” pada tanggal 14 September 2020. Penulis memberikan keterangan bahwa perjanjian ini dapat membuka jalan untuk masa depan tentang perjanjian damai atau normalisasi antara Israel dengan negara Arab lainnya, serta kedua pihak tersebut berjanji untuk melanjutkan upaya mencapai resolusi konflik Israel-Palestina secara adil, komprehensif, dan abadi.<sup>23</sup> Terdapat fokus kajian yang berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu penelitian Mr. Engel membahas tentang tujuan dilakukannya normalisasi oleh Uni Emirat Arab dan Israel, sedangkan peneliti membahas tentang implementasi normalisasi dari sudut pandang Uni Emirat Arab.

#### **E. Batasan Masalah**

Penelitian ini yang berjudul “Implementasi Normalisasi Hubungan Diplomatik Uni Emirat Arab dengan Israel Pada Tahun 2020” memiliki batasan waktu yakni peneliti hanya memfokuskan implementasi normalisasi hubungan diplomatik Uni Emirat Arab dari tahun 2020 hingga pertengahan tahun 2022. Sebab dimulainya normalisasi hubungan diplomatik antara Uni Emirat Arab dengan Israel terjadi pada tahun 2020.

---

<sup>23</sup> Mr. Engel yang berjudul “Supporting the announcement of establishment of full diplomatic relations between the State of Israel and the Uni Arab Emirates and the State of Israel and the Kingdom of Bahrain, and for other purpose” *Journal Eliot L. Engel*, (14 September, 2020): 1-6.

## **F. Argumentasi Utama**

Serangkaian persoalan dan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, peneliti memiliki argumentasi bahwa normalisasi hubungan antara Uni Emirat Arab dengan Israel sejak tahun 2020 ini dilatarbelakangi oleh kepentingan nasional negara Uni Emirat Arab dalam rangka memperluas kerjasama diplomatik, perdagangan, dan keamanan, serta berbagai bidang lainnya. Selain itu, hal-hal yang dilakukan oleh kedua negara tersebut berkaitan dengan Kesepakatan Abraham yang telah mereka buat adalah terjadi karena fokus Uni Emirat Arab terhadap Israel yang memiliki keunggulan pada berbagai bidang dan keunggulan ilmiah serta akademisi. Dengan demikian harapan Uni Emirat Arab untuk mendapatkan sesuatu yang menguntungkan dari implementasi normalisasi hubungannya dengan Israel dapat menyejahterakan Uni Emirat Arab dalam berbagai kehidupan masyarakat, termasuk juga perihal akses pembelian alutsista modern, pendidikan yang unggul, ekonomi meningkat, dan lain sebagainya.

## **G. Sistematika Penulisan**

Penelitian dengan judul “Implementasi Normalisasi Hubungan Diplomatik Uni Emirat dengan Israel Pada Tahun 2020” terbagi menjadi Lima Bab. Berikut uraian sistematika pembahasan dalam setiap Bab:

**BAB I PENDAHULUAN.** Pada Bab I ini berisi tentang pendahuluan yang dijabarkan dalam beberapa bagian. Bagian awal berisi paparan latar belakang masalah yakni alasan peneliti mengambil topik tersebut. Kemudian bagian

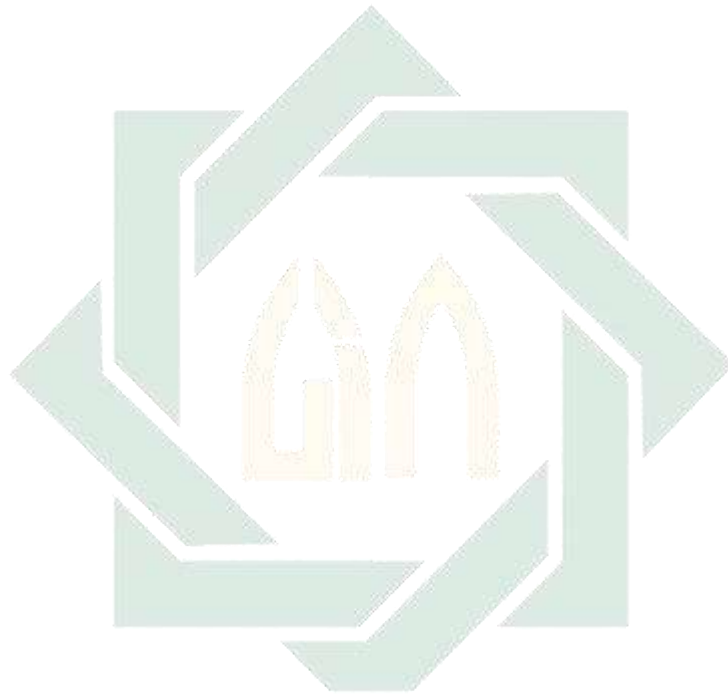
kedua berisi fokus kajian. Selanjutnya terdapat bagian yakni tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian disesuaikan oleh peneliti berdasarkan fokus kajian yang diangkat, sedangkan manfaat penelitian akan diuraikan menjadi manfaat secara akademis dan secara praktis. Berlanjut pada bagian penelitian terdahulu yang memaparkan orisinilitas penelitian dan kemudian terdapat bagian terakhir dalam bab ini adalah penyajian sistematika penulisan sebagai acuan dalam penyusunan karya ilmiah secara sistematis.

**BAB II LANDASAN KONSEPTUAL.** Pada bab II memuat bagian landasan konseptual. Bab ini berisi uraian konsep yang digunakan sebagai acuan dalam menganalisa data penelitian.

**BAB III METODOLOGI PENELITIAN.** Pada bab III terdapat bagian metodologi penelitian yang akan digunakan oleh peneliti. Dalam bab ini, dijabarkan mulai metode pendekatan penelitian yang digunakan, sekaligus jenis penelitian. Selain itu, dipaparkan juga mengenai tingkat analisa data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, hingga alur penelitian atau logika penelitian.

**BAB IV PEMBAHASAN.** Pada bab IV memuat bagian pembahasan, didalamnya akan dipaparkan data temuan penelitian baik berupa data primer maupun data sekunder. Selanjutnya akan dipaparkan secara runtut jawaban dari fokus penelitian yang disusun sebelumnya. Selain itu, pada bab ini menyajikan analisa data penelitian yang dikaitkan dengan konsep yang digunakan.

BAB V PENUTUP. Pada bab V ini terdapat bagian kesimpulan hasil penelitian dan saran yang ditujukan kepada beberapa pihak terkait guna perbaikan pada penelitian-penelitian selanjutnya.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB II

### LANDASAN KONSEPTUAL

#### A. Konsep Implementasi

Kata implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *implement*. Dalam Kamus Bahasa Inggris, implementasi (*implement*) merupakan suatu alat atau perlengkapan.<sup>24</sup> Dalam *Oxford Advance Learner Dictionary*, implementasi adalah menempatkan sesuatu ke dalam tindakan (penerapan sesuatu yang memiliki efek atau efek).<sup>25</sup> Sedangkan implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti penerapan.<sup>26</sup> Ada beberapa pengertian implementasi menurut beberapa tokoh, antara lain:

1. Suharto. Menurutnya, implementasi memiliki arti suatu kegiatan yang berkaitan dengan penyelesaian pekerjaan dengan menggunakan sarana atau alat untuk memperoleh hasil dan tujuan yang diinginkan.<sup>27</sup>
2. Solichin. Menurutnya, implementasi adalah tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok, pemerintah atau swasta dengan maksud untuk mencapai hasil yang ditentukan dalam keputusan kebijakan.<sup>28</sup>

---

<sup>24</sup> Kamus Besar Bahasa Inggris, Implementasi [www.babla.co.id/implementasi](http://www.babla.co.id/implementasi)

<sup>25</sup> Prof. Dr. H. Oemar Hamalik, *Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), 237.

<sup>26</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Definisi Implementasi [www.kbbi/implementasi](http://www.kbbi/implementasi)

<sup>27</sup> Puji Meilita Sugiana, *Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Di Jakarta Selatan*, (Jakarta: Universitas Indonesia 2012), 16

<sup>28</sup> Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 64.

3. Perssman dan Wildavsky. Ia mengatakan bahwa implementasi mirip dengan pelaksanaan, pelaksanaan, pemenuhan, produksi dan penyelesaian (pengolahan, penyelesaian, pengemasan, produksi dan penyelesaian, dan implementasi juga berarti menyediakan alat sesuai dengan pelaksanaan sesuatu yang dapat mengarah pada hasil praktis.<sup>29</sup>
4. Dunn. Menurutnya, implementasi adalah tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mencapai tujuan.<sup>30</sup>
5. Nurdin Usman, implementasi adalah suatu kegiatan, prosedur, prosedur, atau adanya suatu mekanisme sistem, dan pelaksanaan bukan sekedar suatu kegiatan, melainkan suatu kegiatan yang direncanakan dan dicapai sesuai dengan tujuan kegiatan tersebut.<sup>31</sup>

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah penerapan gagasan, konsep, dan kebijakan yang ditujukan untuk mencapai keberhasilan terhadap tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan. Dalam kata lain, implementasi adalah tindakan atau pelaksanaan suatu rencana yang telah dilakukan secara hati-hati dan rinci. Biasanya dilakukan setelah perencanaan yang telah dianggap ideal.

---

<sup>29</sup> Erwan Agus Dan Diah Rati, "Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya Di Indonesia" (Yogyakarta, Gava Media, 2012), 20.

<sup>30</sup> William N. Dunn, Pengantar Analisis Kebijakann Publik (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2000) Cet Ke-IV, 95

<sup>31</sup> Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, (Jakarta: Grasindo, 2002), 70. William N. Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2000), cet. ke-IV, 95-97.

## B. Konsep Normalisasi Hubungan Diplomatik

Hubungan diplomatik dapat mengalami ketegangan, yang berpuncak pada pemutusan hubungan diplomatik. Salah satu penerapan kebijakan pemutusan hubungan diplomatik adalah dengan menarik perwakilan diplomatik ke negara pengirim/pemanggil. Roberto Papini dan Gaetano Cortez, mengutip Sumario Soriokosumo, menafsirkan ini sebagai tindakan sepihak oleh suatu negara yang menarik misi diplomatiknya ke suatu negara dan meminta negara itu untuk melakukan hal yang sama. Prosesnya dimulai dengan pemanggilan kembali duta besar dan stafnya, kemudian dilanjutkan dengan penutupan Kantor kedutaan di negara penerima pada waktu yang telah ditentukan.<sup>32</sup>

Pemutusan hubungan diplomatik tidak mempengaruhi perwakilan konsuler. Apalagi negara penerima akan melakukan hal yang sama dengan duta besarnya sesuai dengan prinsip resiprositas/penundaan. Setelah selesainya tahap ini, hubungan diplomatik antara kedua negara berakhir. Hubungan antar negara bisa mengalami pasang surut.<sup>33</sup>

Kekuatan hubungan diplomatik dapat diukur dengan tingkat urgensi berdasarkan jumlah staf kedutaan. Oleh karena itu, pengurangan jumlah staf kedutaan dapat dilihat sebagai tanda ketegangan. Perubahan hubungan diplomatik juga dapat terjadi karena adanya pergantian kepemimpinan suatu negara yang berujung pada perubahan kebijakan. Setelah hubungan antar negara mengalami anomali, tahap selanjutnya adalah proses normalisasi.

---

<sup>32</sup>Sumaryo Suryokusumo. *Hukum Diplomatik dan Konsuler: Jilid 1* (Jakarta: Tatanusa, 2013), 179.

<sup>33</sup> *Ibid*, 179.





Kemudian kedua belah pihak berusaha mencari jalan keluar untuk menciptakan hubungan yang lebih baik.<sup>37</sup> Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan menghilangkan semua atau sebagian dari penyebab utama perselisihan yang telah menahan hubungan begitu lama. Barston menjelaskan bahwa ada sepuluh tahapan dalam proses normalisasi<sup>38</sup>:

1. Membangun kembali hubungan melalui saluran formal atau informal.

Pada tahap pertama, hubungan diplomatik dinormalisasi dengan membuka kembali jalur resmi dan tidak resmi. Jalur resmi yang dimaksud adalah keberadaan badan perwakilan diplomatik dan badan perwakilan konsuler. Negara adalah aktor tunggal dalam mengimplementasikan jalan ini. Suatu negara yang ingin menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain akan mengirimkan duta besarnya ke negara penerima. Namun, ketika hubungan kedua negara mengalami kondisi yang tidak normal, negara pengirim terkadang bereaksi dengan memanggil kembali duta besarnya, pemimpin korps diplomatik. Setelah berjalannya waktu, jika hubungan kedua negara membaik, negara pengirim akan mengembalikan duta besarnya sebagai tahap pertama untuk menormalkan hubungan diplomatiknya.<sup>39</sup>

2. Aliansi informal, misalnya dengan menyetujui gencatan senjata atau pertukaran tahanan.

---

<sup>37</sup> Ibid, 276-278.

<sup>38</sup> Ibid, 280.

<sup>39</sup> Ari Welianto, "Perwakilan Diplomatik Indonesia: Fungsi dan Tugasnya," 09 Maret 2020, dilihat pada 25 Juli 2022. <https://www.kompas.com/skola/read/2020/03/09/090000369/perwakilan-diplomatik-indonesia-fungsi-dan-tugasnya?page=all>





pengiriman uang, serta perjalanan dan pariwisata. Namun, larangan ekonomi masih berlaku, sehingga pembatasan hanya diterapkan sebagian.<sup>44</sup>

Meskipun masalah Kuba dan Amerika Serikat bukan merupakan penghapusan embargo sepenuhnya, hal itu dapat menjadi contoh tahap keenam dari proses normalisasi.

7. Meninjau kebijakan dan membuat konsesi baru terkait upaya normalisasi.

Selanjutnya, normalisasi tahap ketujuh adalah kajian kebijakan. Hal ini dilakukan dengan mengubah kebijakan yang semula ditetapkan pada periode sebelumnya dan selama hubungan diplomatik luar biasa antara kedua negara. Kebijakan tersebut digantikan oleh resolusi yang mendukung normalisasi. Tindakan ini juga dapat disebut sebagai sinyal tingkat tinggi umum yang telah memasuki ranah kata kerja nyata dan bukan hanya pernyataan.<sup>45</sup>

8. Negosiasi masalah utama dalam normalisasi.

Setelah itu, tahap kedelapan mencakup negosiasi tentang masalah normalisasi. Jika negosiasi awal dilakukan pada tahap kelima untuk mencapai perdamaian, maka pembahasan pada tahap ini mulai berkembang, yaitu topik normalisasi yang akan dilaksanakan ke depan.<sup>46</sup>

9. Menyelesaikan perjanjian normalisasi dan membangun kembali hubungan diplomatik.

---

<sup>44</sup> Ibid, 280.

<sup>45</sup> Ibid, 280.

<sup>46</sup> Ibid, 280.

Tahap kesembilan dari proses normalisasi adalah kesimpulan dari kesepakatan normalisasi. Dalam hal ini dapat berupa diadakannya pertemuan bilateral antara kedua negara yang bersengketa untuk membahas implementasi dan dituangkan dalam bentuk kesepakatan bersama.<sup>47</sup>

#### 10. Implementasi normalisasi.

Terakhir, tahap normalisasi adalah pelaksanaan atau implementasi dari setiap isi perjanjian yang tertulis dalam perjanjian normalisasi pada tahap kesembilan. Dalam praktiknya, proses normalisasi mungkin tidak mengikuti sepuluh tahapan secara berurutan dan langsung masuk ke negosiasi. Hal ini bisa terjadi jika dua negara yang hubungan diplomatiknya dalam keadaan tidak normal didesak untuk segera mengakhiri ketegangan akibat, misalnya, tekanan ekonomi. Namun, proses normalisasi dapat menemui jalan buntu atau proses yang dilalui memiliki banyak tahapan dan memakan waktu. Penyebabnya adalah karena isu yang memicu ketegangan itu kritis dan banyak prinsip yang saling bertentangan. Contohnya adalah normalisasi hubungan diplomatik Vietnam dengan Amerika Serikat.

Model ini menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus para pihak yang berkonflik dapat bergerak cukup cepat untuk melakukan negosiasi langsung, terutama jika ada rasa urgensi dan urgensi, para pihak akan segera melakukan normalisasi hubungan diplomatik. Dalam hal ini, tekanan ekonomi domestik menjadi faktor penting yang mempengaruhi keputusan untuk melanjutkan

---

<sup>47</sup> Ibid, 280.

hubungan keuangan dan perdagangan, yang dimulai dengan normalisasi hubungan diplomatik.<sup>48</sup>

Dalam menjalin hubungan atau kerjasama dengan negara-negara di dunia guna mencapai kepentingan nasionalnya, diplomasi terdiri dari teknik dan tata cara penyelenggaraan hubungan antar negara sehingga diplomasi merupakan alat untuk melaksanakan hubungan internasional (diplomati) yang keberhasilannya tergantung pada kemampuan, keterampilan, dan kemampuan dan keterampilan diplomatik. Hubungan diplomatik merupakan aplikasi dari keberadaan diplomasi.<sup>49</sup>

Terjalannya hubungan diplomatik kedua negara menandakan bahwa kedua negara telah menjalin hubungan baik dan menjalin serangkaian hubungan kerjasama. Kesepakatan untuk menormalkan hubungan diplomatik biasanya mengambil bentuk yang berbeda dalam setiap kasus. Ini termasuk diskusi informal yang dilengkapi dengan pernyataan sepihak tentang hubungan kedua negara, pernyataan bersama, pengaturan normalisasi sepihak, dan perjanjian normalisasi formal. Ada juga normalisasi berdasarkan pertukaran diplomatik informal dan pernyataan sepihak seperti permintaan maaf atau pernyataan kebijakan yang direvisi. Dalam beberapa kasus, membuka kembali fasilitas konsuler untuk meningkatkan perdagangan mungkin dianggap lebih penting daripada menyelesaikan perselisihan politik yang sudah berlangsung lama.<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup> Ibid, 280.

<sup>49</sup> Ibid, 282.

<sup>50</sup> Ibid., 282.





Berdasarkan bagan di atas, dapat dijelaskan bahwa dalam penelitian ini penulis menggunakan konsep normalisasi hubungan diplomatik yang dikemukakan oleh Barston. Normalisasi hubungan diplomatik antara Uni Emirat Arab dengan Israel menghasilkan dokumen Abraham Accords melalui sepuluh tahapan dalam proses implementasi normalisasi. Dengan adanya normalisasi hubungan diplomatik yang dilakukan menyebabkan terlaksananya implementasi di berbagai bidang kerjasama kehidupan masyarakat, diantaranya kerjasama maritim, kerjasama penerbangan sipil, kerjasama ekonomi, kerjasama pertahanan, kerjasama pendidikan, kerjasama kesehatan, dan kerjasama eksplorasi ruang angkasa. Dengan demikian, hal ini menjadi salah satu cara negara Uni Emirat Arab dalam mencapai tujuan nasionalnya dengan berbagai kerjasama untuk memanfaatkan keunggulan-keunggulan yang dimiliki Israel.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan Penelitian dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian adalah pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk menyelidiki, mengungkapkan, dan menganalisis kejadian atau fenomena. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian dengan upaya untuk menganalisa perilaku dan sikap politik yang tidak bisa dihitung berdasarkan angka.<sup>51</sup> Sedangkan metode penelitian kualitatif yang digunakan peneliti adalah dokumentasi, sebab peneliti ingin mengkaji atau menginterpretasi bahan tertulis yang terpublikasikan, seperti buku, jurnal, surat kabar, artikel, dan sejenisnya yang berhubungan dengan judul penelitian. Sehingga penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang merupakan suatu jenis penelitian yang digunakan untuk pengumpulan informasi dan data secara mendalam melalui berbagai literatur, buku, catatan, maupun referensi lainnya, serta hasil penelitian sebelumnya yang relevan untuk mendapatkan jawaban dan landasan teori mengenai masalah yang diteliti.

Mohtar Mas'ood menyatakan bahwa dalam memulai suatu penelitian yang berkaitan dengan Hubungan Internasional harus dimulai dengan suatu permasalahan yang kemudian akan dianalisa menggunakan konsep atau teori

---

<sup>51</sup> Loraine Blaxter, *How to Research: Second Edition*, (Philadelphia: Open University Press, 2001), 74.

Hubungan Internasional pula.<sup>52</sup> Penelitian kualitatif tentang normalisasi hubungan Uni Emirat Arab dengan Israel pada tahun 2020 yang akan dijabarkan oleh peneliti dengan menggunakan konsep implementasi dan normalisasi hubungan diplomatik dari analisis suatu negara Uni Emirat Arab.

## **B. Tingkat Analisis**

Dalam ilmu Hubungan Internasional, terdapat lima level analisa dalam mengkaji suatu permasalahan Internasional, hal ini bersumber dari pemahaman Stephen Andriole, dengan rincian kevel analisa:

1. Level analisa individu
2. Level analisa kelompok individu
3. Level analisa negara-bangsa
4. Level analisa antar negara atau multi negara
5. Level analisa sistem internasional

Untuk memperjelas arah penelitian, peneliti menggunakan tingkat analisis suatu negara, yakni negara Uni Emirat Arab. Tingkatan level ketiga ini merupakan analisa yang berhubungan dengan perilaku unit negara-bangsa yang didalamnya terdapat perilaku individu, kelompok, organisasi, lembaga, dan proses perpolitikan mereka. Sehingga level ini berkaitan dengan tindakan internasional negara yang bersangkutan dalam pembuatan keputusan tentang hubungan internasional, dengan kata lain level analisa negara-bangsa ini

---

<sup>52</sup> Mohtar Mas' oed, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi Dictionary* (Jakarta: LP3S, 1990), 223.

tentang politik luar negeri yang dilakukan oleh suatu negara-bangsa sebagai unit yang utuh.<sup>53</sup>

### C. Teknik Pengumpulan Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh peneliti dengan jenis penelitian kualitatif adalah dengan data berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh peneliti dari sumber data pokok yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari objek penelitian, yaitu buku atau artikel yang menjadi objek dalam penelitian ini. Sedangkan data sekunder diperoleh peneliti dari buku atau artikel yang berperan sebagai pendukung buku atau artikel primer untuk menguatkan konsep yang ada dalam buku atau artikel primer tersebut. Sedangkan teknik pengumpulan data adalah dengan tiga tahapan, yaitu *editing*, *organizing*, dan *finding*. *Editing* merupakan pemeriksaan kembali terkait data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, dan keselarasan makna antara satu dengan yang lain. Selanjutnya adalah tahap *organizing*, yaitu mengorganisir data yang diperoleh dengan kerangka yang diperlukan peneliti. Kemudian tahap terakhir adalah *finding*, yaitu analisis lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori, dan menggunakan metode yang telah ditentukan, sehingga dapat ditemukan kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah.

---

<sup>53</sup> Syelda Titania, "5 Tingkat Analisa dalam Hubungan Internasional" 2 Januari 2020. Diakses pada tanggal 2 Januari 2022 di [www.reviewnesia.com](http://www.reviewnesia.com)

#### **D. Teknik Analisis Data**

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data dengan metode deskriptif, yaitu teknik analisis yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasi apa yang ada, pendapat yang sedang tumbuh, proses yang sedang berlangsung, akibat atau dampak yang terjadi atau kecenderungan yang berkembang.<sup>54</sup>

#### **E. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian ini adalah dengan menggunakan literatur (kepustakaan) dari penelitian sebelumnya sehingga peneliti bisa bertempat dimana saja, baik di perpustakaan daerah, perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan digital, dan lain sebagainya. Sedangkan waktu penelitian dimulai ketika mendapat persetujuan topik penelitian hingga mendapat hasil dan penarikan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan.

#### **F. Tahap-Tahap Penelitian**

Untuk menyelesaikan penelitian ini, peneliti melakukan beberapa tahapan diantaranya:

1. Tahap memilih tema, topik, dan judul

Pada tahap ini, peneliti mencari dan memilih topik permasalahan yang dianggap unik dan menarik untuk diteliti dalam kajian program studi

---

<sup>54</sup> Sumanto, Teori dan Metode Penelitian, Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service), 2014, 179.

Hubungan Internasional. Peneliti tertarik dengan isu tentang negara yang berada di Timur Tengah, yakni implementasi normalisasi hubungan Uni Emirat Arab dengan Israel pada tahun 2020.

2. Tahap studi literatur

Pada tahap ini, peneliti mencari berbagai sumber bacaan atau literatur yang digunakan sebagai pendukung dalam proses penelitian. Baik dengan mengumpulkan buku-buku, jurnal-jurnal, artikel-artikel, maupun kabar berita.

3. Tahap perumusan masalah atau fokus penelitian

Setelah menemukan berbagai literatur yang relevan dan akan digunakan dalam penelitian, peneliti menentukan fokus penelitian yang akan dikaji dari sudut pandang yang dianggap paling tepat.

4. Tahap pengumpulan data

Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan penelitian, baik berupa data primer maupun data sekunder. Data-data tersebut dikumpulkan secara bertahap dan terus menerus hingga fokus kajian yang ditentukan dapat dijawab oleh peneliti.

5. Tahap pengolahan data

Pada tahap ini, peneliti melakukan klarifikasi data guna mempermudah peneliti untuk memahami data yang telah diperoleh selama proses pengumpulan data sebelumnya.

6. Tahap analisis data

Pada tahap ini, peneliti menganalisis data-data temuan penelitian yang kemudian dipadukan dengan teori atau konsep yang digunakan. Hal ini dilakukan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan.

#### 7. Tahap kesimpulan

Pada tahap ini, peneliti menarik kesimpulan atau poin-poin yang digaris bawahi dari hasil penelitian yang ditemukan. Sehingga terdapat hal-hal penting yang diketahui oleh para pembaca pada penelitian ini.

#### 8. Tahap laporan penelitian

Tahap ini merupakan tahap paling akhir dari rangkaian proses penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yakni dengan membuat laporan pertanggungjawaban yang berupa tulisan sebagai kontribusi peneliti agar hasil penelitian ini berguna bagi orang lain.

### **G. Teknik Pengujian Keabsahan Data**

Peneliti memerlukan kebenaran data yang objektif untuk mengukur tingkat kredibilitas pada suatu penelitian agar dapat dipertanggungjawabkan, sehingga keabsahan data penelitian kualitatif sangat penting. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pemeriksaan dan keabsahan data dengan memastikan sumber rujukan atau referensi yang digunakan dalam penelitian memiliki tingkat kredibilitas yang baik.

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Dinamika Normalisasi Hubungan Diplomatik Uni Emirat Arab dengan Israel

##### 1. Proses Normalisasi Hubungan Diplomatik Uni Emirat Arab dengan Israel

Hubungan Uni Emirat Arab dengan Israel kerap kali dipengaruhi oleh posisi mereka dalam kekuasaan politik. Kebudayaan dan sistem pemerintahan yang berada di kawasan Timur Tengah mayoritas memiliki sudut pandang yang kurang baik terhadap Israel sejak awal berdirinya Israel sebagai negara Zionis di Timur Tengah yang menyebabkan rasa trauma bagi negara-negara Timur Tengah.<sup>55</sup> Syeikh Zayed bin Sultan Al Nahyan sebagai Presiden Pertama Uni Emirat Arab telah mengeluarkan pernyataan pada tahun 1975 pada surat kabar Akhbar Al-Youm sebagai berikut<sup>56</sup>:

*“Israel’s policy of expansion and racist plans of Zionism are directed against all Arab countries, and in particular those which are rich in natural resources. No Arab country is safe from the perils of the battle with Zionism unless it plays its role and bears its responsibilities in confronting the Israel enemy”*

Syeikh Zayed bin Sultan Al Nahyan dengan jelas mengutarakan bahwa Israel merupakan negara yang menjadi ancaman keamanan serta menjadi musuh. Hal ini dibuktikan dengan Uni Emirat Arab yang

---

<sup>55</sup> Kristian Coates Ulrichsen, “Israel and The Arab Gulf States: Drivers and Direction of Change”, Center for The Middle East, September 2016, 4.

<sup>56</sup> Hassan Hamdan al-Alkim, The Foreign Policy of the United Arab Emirates (London: Saqi Books, 1989), 175.







*Lawn*.<sup>64</sup> *Abraham Accords* ini merupakan kerjasama yang dilakukan antara Uni Emirat Arab dengan Israel untuk membentuk hubungan bilateral dan diplomatik secara penuh, yang kemudian dikenal dengan istilah normalisasi.<sup>65</sup>

Perjanjian damai antara Israel dan Uni Emirat Arab dan deklarasi perdamaian antara Israel dan Bahrain merupakan langkah pertama dalam proses perdamaian regional sejak perjanjian damai dengan Yordania, dan pembukaan bagi negara-negara Arab lainnya untuk bergabung dengan tren normalisasi dengan Israel. Perjanjian tersebut didasarkan pada pertimbangan keamanan nasional dan kesadaran yang tajam akan ancaman bersama Iran dan sekutu bersama negara-negara tersebut, termasuk Amerika Serikat.

Uni Emirat Arab menjadi negara Arab ketiga setelah Mesir dan Yordania, serta negara Teluk pertama yang mengumumkan hubungan aktif dengan Israel, setelah kedua negara sepakat untuk menandatangani perjanjian untuk bekerja menuju normalisasi penuh hubungan. Perjanjian Uni Emirat Arab-Israel atau *Abraham Accords* (Kesepakatan Abraham) yang ditengahi dan diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang menyebutnya sebagai "terobosan besar".

---

<sup>64</sup> Raden Mas Try Ananto Djoko Wicaksono, "Normalisasi Hubungan Uni Emirat Arab Dengan Israel: Kepentingan Nasional Versus Solidaritas Negara Muslim Terhadap Palestina," *ICMES* 4, no. 3 (2020): 172.

<sup>65</sup> Raden Mas Try Ananto Djoko Wicaksono, "Analisis Kebijakan Uni Emirat Arab dalam Normalisasi Hubungannya dengan Israel" *Jurnal Middle East and Islamic Studies* vol 7, No. 2 Juli, (2020): 133



















transportasi, komunikasi, teknologi, energi, keuangan, kesehatan, dan perubahan iklim. Selain manfaat bilateral, Kesepakatan Abraham meningkatkan potensi penguatan hubungan ekonomi antara Israel dan negara-negara Arab lainnya yang belum memiliki hubungan formal dengannya. Dalam istilah politik, Israel harus berusaha sebanyak mungkin, untuk melibatkan Palestina, Yordania, dan Mesir dalam dinamika ekonomi ini, karena sejauh ini mereka hanya memperoleh sedikit hasil dari perdamaian.<sup>73</sup>

## **2. Perubahan Geopolitik Timur Tengah Pasca Normalisasi Hubungan Diplomatik Uni Emirat Arab dengan Israel**

Peta geopolitik Timur Tengah berubah setelah normalisasi hubungan diplomatik antara Uni Emirat Arab dan Israel. Hal ini juga ditawarkan kepada negara-negara Arab lainnya untuk melakukan normalisasi dengan Israel melalui mediasi Amerika Serikat. Situasi ini membuat Palestina semakin terkepung. Apalagi Israel melanggar perjanjian damai dengan Palestina.<sup>74</sup>

Normalisasi antara Uni Emirat Arab dan Israel merupakan awal dari perubahan hubungan negara-negara Arab dengan Israel. Sudan, Bahrain, Qatar dan Arab Saudi juga diundang untuk berdialog dengan Amerika

---

<sup>73</sup> Amira Elsayed Hassan Seddik, "Geopolitics of the Arab-Israeli Normalization," *Journal of Afro Asian Studies* 2, no. 8 (2021): 17.

<sup>74</sup> Raden Mas Try Ananto Djoko Wicaksono, "Normalisasi Hubungan Uni Emirat Arab Dengan Israel," *Jurnal ICMES* 4, no. 2 (2020): 6.

Serikat untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Namun mereka menolak keras ajakan tersebut. Selain itu, alasan terbesar adalah atas dasar Inisiatif Perdamaian Arab 2002, yang diatur dalam perjanjian bahwa Palestina dan Israel harus membuat perjanjian damai dan bahwa 22 negara Arab akan menormalkan hubungan dengan Israel dengan imbalan penarikan Israel dari Yudea dan Samaria.<sup>75</sup>

Meskipun Bahrain dan Arab Saudi mengizinkan pesawat Israel melewati koridor udara mereka. Mereka masih sepakat tentang perjuangan kemerdekaan dan perdamaian Palestina. Selain itu, Qatar juga telah bertindak dengan cara ini, dan tetap teguh mendukung Inisiatif Perdamaian Arab 2002. Qatar tidak akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel sampai Israel mematuhi perjanjian damai.<sup>76</sup>

Respon terhadap konstelasi Timur Tengah yang semakin kompleks dan normal setelah Uni Emirat Arab dan Israel. Turki dan Iran mengadakan Dialog Dewan Kerjasama Tingkat Tinggi antara Turki dan Iran. Situasi geopolitik yang semakin tidak stabil di Timur Tengah memaksa kedua negara untuk melakukan dialog yang intens. Padahal, normalisasi UEA dan Israel berdampak signifikan terhadap konstelasi politik di kawasan.

---

<sup>75</sup> Mohammed El-nawawy, "Normalizing Normalization : Emirati and Israeli Newspaper Framing of the Israel – Palestine Conflict Before and After the Abraham Accords" 16 (2022): 1869–1892.

<sup>76</sup> Amos Yadlin and Assaf Orion, "The UAE and Israel : Normalization over Annexation , and Denial of a Palestinian Veto," no. 13 (2020): 13-15.

Selama pertemuan dewan, Turki dan Iran membahas semua aspek hubungan bilateral antara Turki dan Iran. Kedua negara tersebut disebut sebagai hubungan penting di kawasan, selain Arab Saudi. Selain itu, keduanya juga membahas langkah-langkah peningkatan kerja sama mengingat kondisi terkini akibat pandemi COVID-19. Dalam pertemuan tersebut, terjadi pertukaran pandangan tentang hubungan bilateral dan isu-isu regional dan internasional.<sup>77</sup>

Diketahui bahwa aliansi kekuatan penting Turki-Iran menunjukkan pengaruh besar di wilayah tersebut. Kedua negara juga sangat intens mendukung perdamaian antara Israel dan Palestina. Meskipun, bagi Israel dan pendukungnya, poros Turki-Iran adalah musuh dan ancaman bagi mereka. Untuk tujuan ini, Israel, melalui bantuan dan dukungan Amerika, menekan negara-negara Arab untuk normalisasi dengan negara. Perebutan kekuasaan dan pengaruh di kawasan antara poros Turki-Iran, poros Saudi, dan poros Uni Emirat Arab-Israel, serta negara-negara Arab lainnya, menunjukkan bahwa Timur Tengah sangat dipengaruhi oleh konflik. Stabilitas keamanan dan kepentingan politik dan ekonomi antar negara menjadi prioritas utama dalam menentukan kebijakan dan keputusan penting.<sup>78</sup>

---

<sup>77</sup> By Shlomo Maital and Ella Barzani, "The Economic Impact of the Abraham Accords After One Year: Passions vs. Interests" (2021): 1–8.

<sup>78</sup> Marlies Glasius, "Peace and Authoritarian Practices: The Impact of Normalization with Israel on the Arab World" 1, no. 1 (n.d.): 82–94.

Dengan normalisasi Israel dengan negara-negara Arab, Israel ingin menunjukkan kepada dunia bahwa ia dapat melakukan apa saja untuk bekerja sama dengannya dan menjalin hubungan dengannya. Lobi Amerika memainkan peran penting dalam keberhasilan normalisasi. Meski hanya Uni Emirat Arab yang ingin membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Sementara itu, negara lain telah menolak seruannya untuk normalisasi.<sup>79</sup>

Efek normalisasi Uni Emirat Arab dengan Israel memiliki dampak besar di Palestina. Adapun Palestina menganggap bahwa Uni Emirat Arab "mengkhianati" dan melakukan upaya untuk menyakiti Palestina. Meskipun UEA berpendapat bahwa perjanjian damai dengan Israel juga merupakan upaya untuk menghentikan pencaplokan Israel atas Tepi Barat. Namun berbeda bagi Israel, bahwa normalisasi dengan UEA hanyalah dorongan untuk meningkatkan hubungan dan kerja sama antara kedua negara dan pencaplokan Tepi Barat akan terus berlanjut.

Setelah normalisasi antara Uni Emirat Arab dan Israel, semakin jelas bahwa Israel memang ingin membangun aliansi poros baru di kawasan. Melalui dukungan dan upaya lobi politik Amerika dalam menawarkan normalisasi dengan negara-negara Arab. Di masa depan, pertengkaran dan ketidaksepakatan antara lawan bicara akan lebih terasa. Poros Emirat-Israel,

---

<sup>79</sup> Aziz Ur Rehman, "Causes behind the Abraham Accord and Its Consequences for the Peace Process in the Middle East," *The Middle East International Journal for Social Sciences* 2, no. 2 (2020): 5.

poros Saudi, poros Turki-Iran dan negara-negara regional lainnya akan bersaing untuk pengaruh dan kekuasaan.<sup>80</sup>

Di tengah meningkatnya jumlah kasus pandemi Covid-19. Ketidaksepakatan antara lawan bicara akan lebih terasa. Apalagi, stabilitas keamanan dan ekonomi di Timur Tengah dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan keadaan yang tidak stabil. Negara-negara Teluk tetap disibukkan dengan upaya meningkatkan perekonomian di tengah pandemi Covid-19. Harga minyak yang rendah juga menjadi faktor. Negara Lebanon juga sedang menjalani "pemulihan" setelah ledakan di pelabuhan Al-Mirfa di Beirut, Lebanon. Lebanon juga sedang menjalani reformasi birokrasi. Negara ini berencana untuk mengubah sistem pemerintahan dari sistem sektarian ke sistem sekuler. Setelah pengangkatan Perdana Menteri baru, Mustafa Adib, harapan rakyat Lebanon dan keputusan reformasi politik pemerintah adalah masa depan Lebanon.<sup>81</sup>

Bukan hanya Lebanon yang menerapkan reformasi politik. Sudan juga mereformasi pemerintahannya setelah pengunduran diri Presiden Omar al-Bashir. Sudan akan menjadi negara sekuler setelah negara itu menerapkan sistem pemerintahan Islam selama tiga dekade.<sup>82</sup> Sementara itu, Tunisia tetap disibukkan dengan konflik internal pemerintah. Padahal

---

<sup>80</sup> Muhammad Rafi Khan, "The Abraham Accords: Israel Resizing Spheres of Influence: JRSP, Vol. 58, No. 2 (April-June 2021): 9.

<sup>81</sup> Elena S. Melkumyan, "Israel in Foreign Policy of the United Arab Emirates: From Confrontation to Normalization," *Vestnik MGIMO-Universiteta* 14, no. 2 (2021): 18.

<sup>82</sup> Muhammad Rafi Khan Sajid Mehmood Shahzad "The Abraham Accords: Israel Resizing Spheres of Influence" 58, no. 2 (2021): 180–186.







berlanjut dengan perjanjian lain yang akan ditandatangani antara kedua perusahaan di area lain. Di pihaknya, Ahmed bin Sulayem mengatakan bahwa perjanjian itu akan berkontribusi pada upaya yang dilakukan untuk mengembangkan hubungan ekonomi dan perdagangan antara kedua negara. DP World menambahkan bahwa misinya adalah untuk memungkinkan area bisnis baru antara Israel dan UEA dan membuat bisnis di wilayah tersebut lebih mudah dan efisien.<sup>88</sup>

Belakangan terungkap bahwa, setelah kesepakatan ini, kedua perusahaan telah memutuskan untuk mengajukan penawaran bersama untuk tender yang akan diadakan untuk privatisasi Pelabuhan Haifa Israel. Pemerintah Israel mengeluarkan keputusan pada Januari 2020 untuk memprivatisasi Pelabuhan Haifa. Pemerintah mengharapkan minimal US\$290 juta dari privatisasi ini. Perusahaan yang memenangkan kontrak akan berhak menjalankan pelabuhan Haifa hingga 2054. Selain itu, Israel juga mencapai kesepakatan untuk pembangunan terminal baru yang rencananya akan dibuka pada 2021 di Haifa setelah kesepakatan ditandatangani dengan pihak Shanghai, Grup Pelabuhan Internasional Tiongkok.

DP World yang berbasis di Dubai bertindak sejalan dengan aktivisme kebijakan luar negeri yang diadopsi dalam beberapa tahun terakhir oleh UEA. Khususnya, mengingat sifat pelabuhan yang dimiliki oleh DP World

---

<sup>88</sup> Aziz Ur Rehman, "Causes behind the Abraham Accord and Its Consequences for the Peace Process in the Middle East," *The Middle East International Journal for Social Sciences* 2, no. 2 (2020): 8.

untuk beroperasi, jelas bahwa pelabuhan dipilih dengan hati-hati untuk memberikan keuntungan geopolitik. Misalnya, DP World memenangkan hak pengoperasian pelabuhan regional seperti Pelabuhan Doraleh, pesaing Jebel Ali, dan telah mengoperasikannya dengan kapasitas rendah untuk memastikan bahwa Dubai tetap menjadi pusat perdagangan terpenting di wilayah tersebut.

Melihat agenda UEA, pemerintah Djibouti memutuskan kontrak dengan DP World dan memutuskan untuk tetap mengoperasikan pelabuhan Doraleh sendiri ke pengadilan dan naik banding ke Lond Sebagai tanggapan atas langkah ini, DP World membawa masalah ini ke Pengadilan Arbitrase Internasional. Pengadilan memutuskan mendukung DP World dan memerintahkan Djibouti untuk mengembalikan hak dan manfaat DP World sesuai dengan perjanjian konsesi yang diperoleh perusahaan dari pemerintah Djibouti pada tahun 2006.<sup>89</sup>

Alasan lain mengapa DP World semakin kuat dalam bisnis pelabuhan di tingkat regional dan global adalah keinginan untuk menggunakan pelabuhan tersebut untuk alasan politik dan militer. Sebenarnya, tidak salah jika negara-negara seperti Israel dan Amerika Serikat mendukung upaya DP World. Alih-alih menggunakan sumber mereka sendiri di Tanduk Afrika, negara-negara ini memanfaatkan kegiatan UEA untuk membela kepentingan mereka. Dalam konteks ini, aktivitas UEA di Somalia, Eritrea,

---

<sup>89</sup> Iksad, "7 Th International Conference On Social Sciences & Humanities Conference" (2021): 16.

dan Yaman juga layak disebut. UEA melalui DP World dan perusahaan lainnya, menandatangani perjanjian di Somaliland Puntland yang merupakan wilayah semi-otonom dan wilayah Somalia, dan melakukan upaya besar untuk mengontrol pelabuhan di wilayah ini. Tujuan utama di balik ini adalah untuk membuat mereka tersedia untuk Israel dan Amerika Serikat, sekutu UEA, dan menggunakannya sebagai pusat logistik untuk melayani kebijakan regional negara-negara tersebut, terutama dalam keterlibatan militer. Namun, pemerintah Somalia mencegah upaya tersebut untuk memastikan bahwa pelabuhan negara dioperasikan pada kapasitas maksimal untuk melayani kepentingan nasional Somalia. Pelabuhan tersebut saat ini digunakan sebagai pangkalan Uni Emirat Arab dalam kampanye militernya di Yaman. Menggunakan kompleks militer di dekatnya, UEA melatih milisi yang mendukung kampanye militer di Yaman.<sup>90</sup>

Selain itu, Pelabuhan Assab penting bagi UEA untuk perdagangan langsung di Laut Merah, Bab el Mandeb dan Teluk Aden. Banyak media internasional menyatakan bahwa saat itulah UEA menjalin kerjasama militer dan intelijen dengan Israel. Dalam hal percepatan kerja sama antara UEA dan Israel di kawasan ini, kegiatan kedua negara di Yaman patut mendapat perhatian khusus. Karena kepentingan strategis Yaman, Israel

---

<sup>90</sup> Christian Henderson, "The UAE as a Nexus State," *Journal of Arabian Studies* 7, no. 1 (2017): 83–93.

juga tertarik di wilayah ini. Setelah proses normalisasi, Israel menemukan peluang untuk mengejar kepentingannya di sini melalui UEA.<sup>91</sup>

Kegiatan terbaru DP World memperjelas bahwa perusahaan berusaha untuk mendapatkan kendali atas pelabuhan di rute strategis di Inisiatif Sabuk dan Jalan China. Dan ini memperjelas bahwa UEA bertindak sejalan dengan kepentingan Amerika Serikat dalam hal persaingan antara yang terakhir dan China. Jika pelabuhan-pelabuhan dalam Inisiatif Sabuk dan Jalan China dioperasikan oleh UEA, yang memiliki hubungan baik dengan Amerika Serikat, UEA akan unggul dalam persaingannya melawan Beijing. Mempertimbangkan semua fakta ini, dapat dikatakan bahwa nota kesepahaman yang ditandatangani antara DP World dan Dover Tower dan fakta bahwa DP World semakin dekat untuk memperoleh hak operasi Pelabuhan Haifa, dirancang untuk mendukung strategi regional UEA. Pemeriksaan yang cermat terhadap hubungan antara Israel dan Uni Emirat Arab, akan mengungkapkan bahwa ini bukan peristiwa pertama dari jenisnya.<sup>92</sup>

Kemitraan antara DP World dan Zim Integrated Shipping Services yang berbasis di Haifa sangat penting dalam hal ini. Ketika DP World mencoba untuk mendapatkan hak operasi 24 pelabuhan controlled oleh British Peninsular dan Oriental Steam Navigation di sepanjang Pantai Timur dan Teluk Amerika Serikat pada tahun 2006, Kongres dan publik Amerika

---

<sup>91</sup> Joel Singer, "The Abraham Accords: Normalization Agreements Signed by Israel with the U.A.E., Bahrain, Sudan, and Morocco," *International Legal Materials* 60, no. 3 (2021): 9.

<sup>92</sup> Elena S. Melkumyan, "Israel in Foreign Policy of the United Arab Emirates: From Confrontation to Normalization," *Vestnik MGIMO-Universiteta* 14, no. 2 (2021): 10.

bereaksi tetapi miliarder Israel Idan Ofer menulis surat kepada kemudian Hillary Clinton dan mendesak Senatonya untuk mendukung DP World.<sup>93</sup>

Dalam surat ini, Ofer mengklaim bahwa DP World tidak menimbulkan ancaman keamanan dan kapal-kapal *Zim Integrated Shipping Services* menggunakan penerbangan negara lain melawan Israel di pelabuhan Dubai untuk menghindari boikot negara-negara Arab Juga, dalam pernyataannya di Komite Angkatan Bersenjata Senat AS, Edward Bilkey dari DP World mengklaim bahwa perusahaannya tidak mendiskriminasi dan menikmati hubungan jangka panjang dengan perusahaan-perusahaan Israel. Lebih lanjut, berbagai laporan menyebutkan bahwa kedua perusahaan memiliki berbagai investasi bersama di Asia, Eropa, dan Amerika Selatan.<sup>94</sup>

Namun, kerja sama maritim antara UEA dan Israel meluas lebih jauh. Bahkan, bisa dikatakan mendapatkan momentum dengan kesepakatan normalisasi. Sejalan dengan itu, DP World's Jebel Ali Free Zone (JAFZA) menandatangani MoU dengan Federasi Kamar Dagang Israel (FICC). Usai penandatanganan yang dilakukan secara virtual, baik Sultan Ahmed bin Sulayem maupun Presiden FICC Uriel Lynn mengeluarkan pernyataan yang menegaskan bahwa MoU ini akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi kawasan.

Perkembangan ini diikuti oleh perusahaan pelayaran Israel yang mengumumkan bahwa mereka telah mulai menawarkan layanan langsung

---

<sup>93</sup> Shmuel Even, Tomer Fadlon, and Yoel Guzansky, "The Economic-Strategic Dimension of the Abraham Accords," *Institute for National Security Studies* No. 1388, no. October (2020).

<sup>94</sup> Hussein Ibish, "The UAE's Evolving National Security Strategy" (2017): 68, [www.agsiw.org](http://www.agsiw.org).







Tampaknya kerja sama di bidang penerbangan sipil akan berjalan dengan pesat, kedua negara akan mencoba mengambil manfaat dari inisiatif ini secara ekonomi, dan sebenarnya akan ada berbagai manfaat dari kerja sama ini. Pertama, peningkatan kerja sama di bidang ini akan mendorong pariwisata dan perdagangan kedua negara. Jumlah penumpang mungkin akan mengalami lonjakan pesat karena belum ada penerbangan langsung atau pembebasan visa antara Israel dan UEA. Selain itu diperkirakan akan meningkat, volume perdagangan kedua negara juga merupakan manfaat penting lain dari kerja sama tersebut adalah saling berbagi pengalaman di bidang penerbangan dan industri terkait. Kedua negara akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari pengalaman masing-masing di lapangan. Ini akan menjadi sangat penting karena Israel memiliki kemampuan yang kuat dari industri teknologi tinggi di bidang penerbangan sipil dan sektor terkait.<sup>97</sup>

Dalam hal ini, UEA kemungkinan akan mendapat manfaat yang signifikan dari perjanjian kerja sama ini. Pembukaan wilayah udara Israel ke UEA akan membantu Abu Dhabi dan Tel Aviv dalam beberapa masalah. Dengan memiliki akses ke wilayah udara Israel, UEA akan memiliki kesempatan untuk mempromosikan pariwisata dari Israel atau negara-negara Barat, terutama Eropa. Demikian pula, Tel Aviv akan memiliki kesempatan untuk menggunakan wilayah udara Emirat untuk menjangkau

---

<sup>97</sup> İsmail Numan Telci, "Israeli-Emirati Normalization and the Strategic Cooperation in Maritime and Aviation Sectors," *Al-Jazeera Centre For Studies* (2020): 2-9.

orang-orang Arab yang ingin normalisasi dengan Israel. Oleh karena itu, Israel menggunakan UEA untuk menormalkan hubungannya dengan negara-negara Arab.

Peningkatan kerja sama antara Tel Aviv dan Abu Dhabi juga akan berdampak pada penerbangan Timur Tengah. Hal ini terutama terjadi pada sebagian besar maskapai penerbangan aktif di kawasan ini seperti Turkish Airlines dan Qatar Airways. Bahkan, selain kerja sama timbal balik antara Israel dan UEA, kepemimpinan Emirat berupaya menggunakan perjanjian normalisasi sebagai daya ungkit terhadap negara-negara saingan seperti Turki dan Qatar. Perusahaan penerbangan Emirat yang memulai penerbangan ke Israel akan berusaha membuat rute ini lebih populer dan akan mencoba membatasi keberhasilan perusahaan penerbangan Turki dan Qatar, yang terus-menerus bersaing dengan mereka. Beberapa rute terpopuler Turkish Airlines akan dimasukkan dalam jadwal penerbangan Emirates Airlines dan Etihad Airways sebagai bagian dari proses normalisasi dan akan digunakan sebagai leverage terhadap Turkish Airlines.

Otoritas penerbangan sipil Israel dan UEA menandatangani perjanjian untuk meluncurkan 28 penerbangan komersial antara UEA dan Tel Aviv setiap minggu. Harus dinyatakan bahwa perjanjian ini tidak terbatas pada penerbangan langsung antara kedua negara dan mencakup penerbangan bersama yang dijadwalkan antara UEA dan Istanbul atau Tel Aviv dan



mengatakan, UEA dan Israel memiliki antara \$600 juta hingga \$700 juta dalam perdagangan bilateral.

Kementerian Ekonomi Israel mengatakan bahwa perjanjian terbaru mencakup 95 persen produk yang diperdagangkan, yang akan bebas bea segera atau bertahap, diantaranya produk makanan, pertanian dan kosmetik, serta peralatan medis dan obat-obatan.

Pembicaraan menuju perjanjian perdagangan bebas ini telah berlangsung sejak bulan November lalu. Mereka menyimpulkan setelah empat putaran negosiasi, termasuk bulan lalu di Mesir antara Perdana Menteri Israel Naftali Bennett dan pemimpin de facto UEA, Putra Mahkota Abu Dhabi Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Secara terpisah, UEA mengatakan, perjanjian itu secara substansial mengurangi atau menghapus tarif pada berbagai barang, meningkatkan akses pasar untuk layanan dan mempromosikan arus investasi. Ini juga akan menciptakan mekanisme untuk ekspansi usaha kecil dan menengah.

Israel menjadi tuan rumah pertemuan para diplomat top dari Amerika Serikat dan tiga negara Arab - UEA, Bahrain dan Maroko - yang telah menormalkan hubungan sejak 2020. Sudan juga setuju untuk menormalkan hubungan dengan Israel, meskipun belum menyelesaikan kesepakatan. Namun Israel dan Uni Emirat Arab (UEA) hubungannya sudah semakin

erat, dengan diselesaikannya negosiasi untuk perjanjian perdagangan bebas pada tanggal 1 April 2022.<sup>100</sup>

#### **4. Kerjasama Penguatan Pertahanan**

Berdasarkan kepentingan keamanan dan pertahanan bersama dengan Israel, kesepakatan Abraham ada untuk membangun aliansi yang lebih kuat untuk melawan Iran. Bahkan terdapat harapan bahwa penguatan tersebut menjadi “pengubah permainan” dalam arti mendorong Iran dan Turki untuk mengubah atau memoderasi kebijakan mereka di kawasan.

Sejak tahun 2011, negara Uni Emirat Arab dengan Israel memiliki visi yang sama perihal musuh mereka di daerah kawasan, sehingga mempunyai landasan bersama untuk membentuk hubungan keamanan dan pertahanan yang lebih dalam. Israel merupakan negara yang memiliki fasilitas militer terbesar pada kawasan tersebut dan satu-satunya memiliki kekuatan nuklir yang telah diakui dalam perangnya melawan ancaman ekspansionisme Iran oleh Arab Saudi dan aliansi Teluk Uni Emirat Arab.

Setelah pemberontakan regional, kebutuhan negara-negara Teluk yang meningkat akan sistem pertahanan dan pemantauan canggih untuk melindungi warganya, terutama negara-negara Teluk Arab seperti Uni Emirat Arab memiliki beberapa konflik dengan Iran, sehingga Uni Emirat

---

<sup>100</sup> Boutkhil Guemide and Samir Amir, “The US-Backed Moroccan- Israeli Normalization Agreement: Implications on the Future of the Maghreb Union,” *The Journal of US-Africa Studies International Journal of US and African Studies* 1, no. 1 (2021).

Arab perlu mencegah hegemoni Iran di kawasan Timur Tengah untuk memastikan keamanan nasionalnya. Kerjasama keamanan ini tidak hanya memungkinkan kerjasama yang berlebihan dalam teknologi militer dan intelijen yang berharga, tetapi perjanjian ini juga memfasilitasi pergeseran konsekuensial dalam keseimbangan kekuatan regional dengan mempromosikan tindakan anti-Iran.<sup>101</sup>

Meskipun UEA menekankan potensi perjanjian untuk membawa perdamaian, stabilitas dan moderasi di kawasan itu dan bahkan menggambarkan dirinya sebagai penasihat Turki dan mediator antara Iran dan Israel, Menteri Luar Negeri UEA, Anwar Gargash, mengatakan perjanjian itu adalah keputusan strategis yang akan meningkatkan posisi Uni Emirat Arab di Timur Tengah.

Seperti yang dilaporkan Reuters kepada Kongres pada Selasa (13/4/2021), juru bicara Departemen Luar Negeri mengatakan pemerintah bergerak maju dengan usulan penjualan ke UEA. Bahkan prosesnya sedang berlangsung karena Departemen Luar Negeri terus meninjau perincian dan berkonsultasi dengan pejabat UEA mengenai penggunaan senjata. Biden telah menanggukkan kesepakatan yang disetujui Donald Trump untuk meninjaunya. Penjualan ke negara Teluk itu selesai tepat sebelum Trump meninggalkan jabatannya sebagai presiden AS.

---

<sup>101</sup> Ali Alfoneh "Iran Reacts Angrily to the UAE-Israel Landmark Agreement" Arab Gulf States Institute in Washington, 17 Agustus 2020.

Pada bulan November sebelum kongres, Trump telah menyetujui penjualan ke UEA sebagai kesepakatan sampingan dengan *Abraham Accords*, sebuah perjanjian yang ditengahi oleh AS pada bulan September ketika UEA setuju untuk menormalkan hubungan dengan Israel. Pada bulan-bulan terakhir pemerintahan Trump, Israel membuat kesepakatan dengan UEA, Bahrain, Sudan dan Maroko sebagai bagian dari kesepakatan.<sup>102</sup>

Putra Mahkota Abu Dhabi Sheikh Mohammed bin Zayed, pemimpin *de facto* UEA, mengadakan pembicaraan dengan Bennett pada Senin (13/12/21), setahun setelah kedua negara melakukan normalisasi hubungan diplomatik. Perdana menteri Israel mengatakan dia ingin meningkatkan hubungan ekonomi dan komersial dengan UEA. Dia juga diharapkan mendesak UEA untuk mengambil sikap yang lebih keras dalam menanggapi program nuklir Iran. UEA berbagi kekhawatiran dengan Israel tentang potensi ancaman senjata nuklir dari Iran, tetapi negara Arab itu juga berusaha membangun hubungan yang lebih baik dengan Teheran. UEA menjadi negara Arab ketiga yang sepenuhnya mengakui Israel tahun lalu, sebagai bagian dari apa yang disebut kesepakatan Abraham yang dipelopori oleh AS.

---

<sup>102</sup> Ari Heistein Yoel Guzansky, "The Benefits and Challenges of UAE-Israel Normalization," *Mei* (2020): 2020, <https://www.mei.edu/publications/benefits-and-challenges-uae-israel-normalization>.





Keamanan Nasional UEA Sheikh Tahnoun bin Zayed, saudara laki-laki Sheikh Mohammed, bertemu dengan Presiden Iran Ibrahim Raisi selama kunjungan ke Teheran. Sheikh Tahnoun menyampaikan harapannya bahwa kunjungan tersebut akan menjadi titik balik dalam hubungan antar negara.<sup>104</sup>

Salah satu keuntungan Uni Emirat Arab setelah normalisasi hubungan dengan Israel adalah membuka akses senjata canggih buatan Amerika Serikat. Pemerintahan Presiden AS Joe Biden terus menjual lebih dari US\$23,37 miliar (Rp340 triliun) senjata ke Uni Emirat Arab (UEA), termasuk pesawat F-35 canggih dan paling kuat di Timur Tengah, drone bersenjata, dan peralatan lainnya. Paket penjualan senilai \$23,37 miliar berisi produk dari General Atomics, Lockheed Martin dan Raytheon Technologies, termasuk 50 pesawat F-35 Lightning II, hingga 18 Sistem Udara Tak Berawak MQ-9B dan paket amunisi udara ke udara dan udara ke darat ditanggung oleh Uni Emirat Arab kepada Amerika Serikat. Berdasarkan temuan tentang dampak kesepakatan *Abraham Accords* yang dilakukan oleh Uni Emirat Arab dan Israel di atas, power ditunjukkan pada bidang militer tersebut dijadikan kartu penting oleh Uni Emirat Arab dalam memproyeksikan kekuatannya terhadap dunia.<sup>105</sup>

---

<sup>104</sup> <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-59636500> 13 Desember 2021, diakses pada 15 Juni 2022

<sup>105</sup> Berlianto, AS akan jual 18 drone MQ-9B Reaper ke UEA, <https://international.sindonews.com/read/222338/42/as-akan-jual-18-drone-mq-9b-reaper-ke-uea-1604650300> 6 November 2020, diakses pada 15 Juni 2022



F35/Airforce Technology



MQ-9B STOL/General Atomics Aeronautical  
(Sumber: Breaking Defense 19fortyfive.com)

UEA sebelumnya telah mengambil garis keras terhadap Iran bersama Israel, karena mendukung keputusan Presiden AS Donald Trump pada 2018 untuk meninggalkan perjanjian bersejarah yang membatasi kegiatan nuklir Iran dengan imbalan pencabutan sanksi internasional. Iran menanggapi

penerapan kembali sanksi Trump dengan secara bertahap melanggar komitmen utamanya di bawah kesepakatan nuklir. Negara itu bersikeras bahwa program nuklirnya adalah untuk tujuan damai, tetapi sekarang sedang memproses uranium di bawah tingkat yang dibutuhkan untuk membuat bom.

Bennett menuduh musuh bebuyutan Israel sebagai taktik dalam negosiasi dengan negara-negara besar di Wina untuk menyelamatkan kesepakatan awal dengan membawa Iran dan Amerika Serikat kembali ke kepatuhan. Presiden AS Joe Biden ingin mengakhiri pembicaraan dan mengambil tindakan terhadap Iran, termasuk menjatuhkan sanksi yang lebih keras dan mempersiapkan kemungkinan serangan militer. UEA telah menyatakan penentangannya terhadap langkah-langkah tersebut dan berusaha untuk mengurangi ketegangan dengan menghindari konflik besar dimana Amerika Serikat atau bahkan negara-negara di kawasan itu dapat berpartisipasi.<sup>106</sup>

## 5. Kerjasama Pendidikan

Uni Emirat Arab menandatangani nota kesepahaman dengan Negara Israel tentang masalah pendidikan yang mencakup pendidikan umum, tinggi, teknis dan kejuruan, selain mempromosikan pertukaran kunjungan akademik dan pelajar antara kedua belah pihak, dalam sebuah langkah yang bertujuan untuk memperkuat kerjasama antara keduanya untuk semangat

---

<sup>106</sup> Ari Heistein & Yoel Guzansky, "The benefits and challenges of UAE-Israel normalization." *Journal Middle East Institute* (2020): 3.

mengembangkan kemitraan dan hubungan yang lebih erat yang membawa manfaat, kebaikan dan kemajuan bagi rakyatnya.

Langkah ini merupakan perpanjangan dari Kesepakatan Abraham antara Uni Emirat Arab dan Negara Israel dan visi yang dihasilkan dan jalur pembangunan untuk mendukung perdamaian, koeksistensi dan pemahaman, dan dalam kerangka upaya yang bertujuan untuk mengembangkan hubungan dan memperkuat proses perdamaian di kawasan dengan mendorong pertumbuhan ekonomi, mendorong inovasi teknis dan mengembangkan kualitas pendidikan.

Nota kesepahaman ditandatangani di sisi Emirat oleh Menteri Pendidikan Hussein bin Ibrahim Al Hammadi, dan di sisi Israel, Dr. Yifat Shasha Biton, Menteri Pendidikan di Israel, di depan Dr. Muhammad Ibrahim Al Mualla. Wakil Menteri Pendidikan Bidang Akademik, dan Muhammad Mahmoud Al-Khaja, duta besar negara itu untuk Israel. Hussain bin Ibrahim Al Hammadi meninjau ulang rencana keseratus dan tahun persiapan untuk tahun kelima puluh dan aspirasi UEA untuk menjadi negara terbaik di dunia dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan pada tahun 2071, selain menangani masalah bilateral di bidang pendidikan dan berbagai bidang kerjasama.<sup>107</sup>

Sesuai dengan ketentuan dalam Nota Kesepahaman, akan dibentuk panitia bersama untuk melaksanakan bidang-bidang kerja sama yang

---

<sup>107</sup> Shmuel Even, Tomer Fadlon, and Yoel Guzansky, "The Economic-Strategic Dimension of the Abraham Accords," *Institute for National Security Studies* No. 1388, no. October (2020): 3

disebutkan di dalamnya, yang meliputi memfasilitasi, mendorong, memajukan dan mengembangkan kerja sama di bidang pendidikan dengan bekerja mendukung komunikasi dan meningkatkan kerja sama pendidikan. Mendorong saling kunjungan ke lembaga administrasi dan pendidikan dan mengikuti kursus pelatihan, acara, konferensi, seminar pendidikan yang ditawarkan oleh masing-masing pihak, serta mendorong pertukaran kunjungan antara mahasiswa umum dan pendidikan tinggi dan berpartisipasi dalam pertukaran pelajar, program dan kegiatan yang berkaitan dengan kemahasiswaan, pertukaran kurikulum dan literatur pendidikan dan metodologis.<sup>108</sup>

Nota Kesepahaman juga memungkinkan pertukaran informasi terkait kesetaraan kualifikasi, teknologi informasi, solusi pendidikan dan komunikasi yang digunakan dalam pendidikan, dan informasi tentang integrasi sosial dalam pendidikan, terutama melalui program yang dibuat untuk membantu anak-anak dengan ketidakmampuan belajar dan orang-orang dengan disabilitas, selain informasi terkait Metodologi untuk mencari dan merawat anak berbakat dan cerdas.

Hussein bin Ibrahim Al Hammadi memimpin delegasi tingkat tinggi dalam rangka kunjungan kerja ke Negara Israel yang berlangsung selama beberapa hari, di mana banyak masalah pendidikan dan bidang kerjasama pendidikan dibahas, dan kunjungan lapangan dilakukan ke lembaga

---

<sup>108</sup> Irina D. Zvyagelskaya, "The Arab-Israeli Rapprochement: A Search for New Normality?," *Vostok (Oriens)* 2021, no. 3 (2021): 7.

pendidikan, juga hal ini membahas perkembangan terbaru dalam sistem pendidikan di kedua negara dan dunia.

## **6. Kerjasama Kesehatan**

Uni Emirat Arab dan Israel menindaklanjuti normalisasi hubungan kedua negara dengan memperkuat kerja sama di berbagai bidang, termasuk kesehatan. Menteri Kesehatan Israel Yuli Edelstein dan mitranya dari Uni Emirat Arab Abdul Rahman Muhammad Al Owais sepakat untuk menjalin kerja sama langsung di bidang kesehatan. Kedua menteri sepakat menunjuk seorang wakil untuk bertanggung jawab memantau kesepakatan di bidang kesehatan. Yang paling dekat adalah kerja sama dalam menangani wabah Covid-19. Mengutip Reuters, Jumat (26/6), Netanyahu mengatakan, kerja sama teknis penanganan pandemi COVID-19 akan disusun oleh menteri kesehatan masing-masing negara. Namun, dia tidak menjelaskan lebih detail apakah pengembangan tersebut terkait dengan pembuatan vaksin atau tidak.<sup>109</sup>

## **7. Kerjasama Eksplorasi Ruang Angkasa**

Uni Emirat Arab dan Badan Antariksa Israel telah menandatangani perjanjian untuk meningkatkan kerjasama di bidang penelitian ilmiah, khususnya yang berkaitan dengan eksplorasi ruang angkasa. Kolaborasi ini dilakukan selama Space Week di Dubai Expo 2020. Menteri Teknologi

---

<sup>109</sup> Ari Heistein & Yoel Guzansky, "The benefits and challenges of UAE-Israel normalization." *Journal Middle East Institute* (2020): 5.

Canggih UEA Sarah Al Ameri bertemu dengan Menteri Israel di Orit Farkash Hacoheh untuk menandatangani perjanjian ini. Hal ini dilakukan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kemajuan manusia. Menteri Teknologi Canggih UEA Sarah Al Ameri bertemu dengan Menteri Israel di Orit Farkash Hacoheh untuk menandatangani perjanjian ini. Hal ini dilakukan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kemajuan manusia.<sup>110</sup>

UEA akan bekerja pada upaya kedua Israel untuk mendarat di bulan - misi Beresheet 2 sebagai bagian dari kesepakatan, dengan mengembangkan instrumen ilmiah untuk mendaratkan pesawat ruang angkasa di bulan pada tahun 2024. Itu setelah pesawat Beresheet 1 jatuh pada 2019 sebelumnya mencapai tujuannya. Perjanjian tersebut menetapkan kerangka kerja untuk kemitraan strategis yang saling menguntungkan yang bertujuan untuk meningkatkan upaya untuk mengumpulkan dan menganalisis data ilmiah. Perjanjian tersebut juga akan memungkinkan universitas Emirat dan Israel untuk meluncurkan kolaborasi penelitian bersama.<sup>111</sup>

---

<sup>110</sup> Gadi Hitman & Chen Kertcher, "The Case for Arab-Israeli Normalization during conflict," *The Journal for Interdisciplinary Middle Eastern Studies*, Ariel University Press, Vol. 2, Spring (2018): 47-70

<sup>111</sup> Joel Singer, "The Abraham Accords: Normalization Agreements Signed by Israel with the U.A.E., Bahrain, Sudan, and Morocco," *International Legal Materials* 60, no. 3 (2021): 12.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Normalisasi hubungan diplomatik Uni Emirat Arab dengan Israel dengan nama *Abraham Accords* yang diumumkan pada tahun 2020 merupakan kesepakatan untuk meningkatkan potensi di berbagai kehidupan masyarakat. Dilihat dari hasil implementasi normalisasi hubungan diplomatik Uni Emirat Arab dengan Israel untuk mencapai kepentingan nasionalnya dalam berbagai bidang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kerjasama maritim melalui kontrak antara perusahaan pelabuhan DP World dan Dubai Customs, keduanya menawarkan pengiriman barang, operasi pelabuhan, dan layanan maritim terhadap Israel.
2. Kerjasama penerbangan sipil melalui pembaharuan rute penerbangan dan berbagi layanan *codeshare* bersama, layanan kargo, dan bidang teknik.
3. Kerjasama ekonomi melalui perdagangan bebas dengan pengurangan dan penghapusan tarif pada berbagai barang, peningkatan akses pasar untuk layanan dan mempromosikan arus investasi.
4. Kerjasama pertahanan melalui pembelian teknologi militer dan intelijen yang berharga dengan mudah untuk meningkatkan keamanan negara UEA.
5. Kerjasama pendidikan melalui pertukaran kunjungan antara mahasiswa umum dan pendidikan tinggi dan berpartisipasi dalam pertukaran pelajar, program dan kegiatan yang berkaitan dengan kemahasiswaan, pertukaran kurikulum dan literatur pendidikan, serta metodologis.

6. Kerjasama kesehatan melalui teknis pengendalian penanganan pandemi Covid-19 dalam pengembangan pembuatan vaksin.
7. Kerjasama eksplorasi ruang angkasa melalui pengembangan instrumen ilmiah untuk mendaratkan pesawat ruang angkasa.

## **B. Saran**

Dengan adanya penelitian ini, besar harapan agar Uni Emirat Arab normalisasi dengan Israel nantinya dapat mewujudkan perdamaian yang akan berdampak positif bagi Palestina, sehingga normalisasi ini bukan hanya sekedar mencapai kepentingan nasional Uni Emirat Arab saja, namun dapat membuka ruang dialog demi ketenangan dan keselamatan negara-negara Arab lainnya. Selain itu, Uni Emirat Arab dan Israel yang telah menyepakati *Abraham Accord* harus berprinsip independen agar tidak mudah terintervensi negara lain.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Al-Alkim, Hassan Hamdan. *The Foreign Policy of the United Arab Emirates*. London: Saqi Books, 1989.
- Blaxter, Loraine. *How to Research: Second Edition*. Philadelphia: Open University Press, 2001.
- El-nawawy, Mohammed. "Normalizing Normalization : Emirati and Israeli Newspaper Framing of the Israel – Palestine Conflict Before and After the Abraham Accords" 16 (2022): 1869–1892.
- Even, Shmuel, Tomer Fadlon, and Yoel Guzansky. "The Economic-Strategic Dimension of the Abraham Accords." *Institute for National Security Studies* No. 1388, no. October (2020).
- Gladius, Marlies. "Peace and Authoritarian Practices: The Impact of Normalization with Israel on the Arab World" 1, no. 1 (n.d.): 82–94.
- Guemide, Boutkhil, and Samir Amir. "The US-Backed Moroccan- Israeli Normalization Agreement: Implications on the Future of the Maghreb Union." *The Journal of US-Africa Studies International Journal of US and African Studies* 1, no. 1 (2021).
- Güney, Nurşin Ateşoğlu, and Vişne Korkmaz. "A New Alliance Axis in the Eastern Mediterranean Cold War: What the Abraham Accords Mean for Mediterranean Geopolitics and Turkey." *Insight Turkey* 23, no. 1 (2021).
- Henderson, Christian. "The UAE as a Nexus State." *Journal of Arabian Studies* 7, no. 1 (2017): 83–93.
- Hitman, Gadi, and Chen Kertcher. "The Case for Arab-Israeli Normalization during Conflict." *Journal for Interdisciplinary Middle Eastern Studies* 2, no. December (2018): 43–63.
- Hitman, Gadi, and Moti Zwilling. "Normalization with Israel: An Analysis of Social Networks Discourse Within Gulf States." *Ethnopolitics* 0, no. 0 (2021): 1–27. <https://doi.org/10.1080/17449057.2021.1901380>.
- Ibish, Hussein. "The UAE's Evolving National Security Strategy" (2017): 68. [www.agsiw.org](http://www.agsiw.org).
- Iksad. "7 Th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES CONFERENCE Edited By" (2021).
- Ismail Numan Telci. "Israeli-Emirati Normalization and the Strategic Cooperation in Maritime and Aviation Sectors" (2020): 10. <https://studies.aljazeera.net/sites/default/files/articles/documents/2020-11/Israeli-Emirati Normalization and the Strategic Cooperation in Maritime and Aviation Sectors.pdf>.
- Khan, Muhammad Rafi. "The Abraham Accords: Israel Resizing Spheres of

- Influence: JRSP, Vol. 58, No. 2 (April-June 2021) Muhammad Rafi Khan □ Sajid Mehmood Shahzad □□ The Abraham Accords: Israel Resizing Spheres of Influence” 58, no. 2 (2021): 180–186.
- Maital, By Shlomo, and Ella Barzani. “The Economic Impact of the Abraham Accords After One Year : Passions vs . Interests” (2021): 1–8.
- Melkumyan, Elena S. “Israel in Foreign Policy of the United Arab Emirates: From Confrontation to Normalization.” *Vestnik MGIMO-Universiteta* 14, no. 2 (2021).
- Rehman, Aziz Ur. “Causes behind the Abraham Accord and Its Consequences for the Peace Process in the Middle East.” *The Middle East International Journal for Social Sciences* 2, no. 2 (2020).
- Seddik, Amira Elsayed Hassan. “Geopolitics of the Arab-Israeli Normalization.” *Journal of Afro Asian Studies* 2, no. 8 (2021).
- Singer, Joel. “The Abraham Accords: Normalization Agreements Signed by Israel with the U.A.E., Bahrain, Sudan, and Morocco.” *International Legal Materials* 60, no. 3 (2021).
- Wardoyo, Broto, and Rizal Valentino. “Breaking Taboo : Explaining the United Arab Emirates ’ Decision to Establish Diplomatic Relationship with Israel ‘ Breaking Taboo ’: Keputusan Uni Emirat Arab Untuk Melakukan Normalisasi Hubungan Diplomatik Dengan Israel” (n.d.): 147–174.
- Wicaksono, Raden Mas Try Ananto Djoko. “Normalisasi Hubungan Uni Emirat Arab Dengan Israel: Kepentingan Nasional Versus Solidaritas Negara Muslim Terhadap Palestina.” *ICMES* 4, no. 3 (2020).
- . “Normalisasi Hubungan Uni Emirat Arab Dengan Israel.” *Jurnal ICMES* 4, no. 2 (2020).
- Yadlin, Amos, and Assaf Orion. “The UAE and Israel : Normalization over Annexation , and Denial of a Palestinian Veto,” no. 13 (2020).
- Yoel Guzansky, Ari Heistein. “The Benefits and Challenges of UAE-Israel Normalization.” *Mei* (2020): 2020. <https://www.mei.edu/publications/benefits-and-challenges-uae-israel-normalization>.
- Zaga, Moran. “Israel and the United Arab Emirates : Opportunities on Hold.” *Israel’s Relations with Arab Countries: The Unfulfilled Potential*, no. December (2018).
- Zvyagelskaya, Irina D. “The Arab-Israeli Rapprochement: A Search for New Normality?” *Vostok (Oriens)* 2021, no. 3 (2021).
- “The Abraham Accords: Israel–Gulf Arab Normalisation.” *Strategic Comments* 26, no. 8 (2020).



- periphery-doctrine/, diakses pada 25 Februari 2020 Hitman, Gadi, and Chen Kertcher. "The Case for Arab-Israeli Normalization during Conflict." *Journal for Interdisciplinary Middle Eastern Studies* 2, no. December (2018): 43–63.
- Heistein, Ari., & Yoel Guzansky, "The benefits and challenges of UAE-Israel normalization." *Journal Middle East Institute* (2020): 3.
- Heni, Fatiha Dazi "The Gulf States and Israel after the Abraham Accords," *Journal Arab Reform Initiative* (2020): 5.
- Hitman, Gadi., & Chen Kertcher, "The Case for Arab-Israeli Normalization during conflict," *The Journal for Interdisciplinary Middle Eastern Studies*, Ariel University Press, Vol. 2, Spring (2018): 47-70.
- Hoover, Jack V., Kevin Krotz, Pierce MacConaghy, dkk "Trump Administration Brokers Accords to Normalize Relations Between Israel and Six Countries" *The American Journal of International Law*, Vol.115:1 (2021): 116-119.
- Jeong, Hae Won. "The Abraham Accords and Religious Tolerance: Three Tales of Faith-Based Foreign-Policy Agenda Setting." *Middle East Policy* 28, no. 1 (2021).
- Jones, Clive., dan Yoel Guzansky, "Hubungan Israel dengan Negara-Negara Teluk: Menuju Munculnya Rezim Keamanan Diam-diam?," *Kebijakan Keamanan Kontemporer* 38, no. 3 (2017): 398–419.
- Lehrs, Lior "Is Trump's Deal of the Century' Really a Peace Plan?" Middle East Institute, 20 Mei 2019.
- Luard, Even. *The Balance of Power The System of International Relations, 1648-1815. MACMILLAN ACADEMIC AND PROFESSIONAL LTD*, 1992.
- Magid, Jacob "UAE Ambassador: 'Abraham Accords Were about Preventing Annexation'" The Times of Israel, 2 Februari 2021.
- Magid, Jacob "UAE Envoy: We're Not a Democracy, but Public Support Allowed for Normalization" The Times of Israel, 29 September 2020.
- McGraw, Meridith "Trump's 'Maximum Pressure' Peaks Just before Election" POLITICO, 19 September 2020
- Mehta, Aaron "US State Dept. Approves UAE's Purchase of F-35 Jets, MQ-9 Drones" Defense News, 10 November 2020.
- Melkumyan, Elena S. "Israel in Foreign Policy of the United Arab Emirates: From Confrontation to Normalization." *Vestnik MGIMO-Universiteta* 14, no. 2 (2021).
- Middle East Institute. "The Biden Administration and the Middle East: Policy Recommendations for a Sustainable Way Forward," no. March (2021).
- Miller, Aaron David "I'm a Veteran Middle East Peace Negotiator. Trump's Plan Is the Most Dangerous I've Ever Seen." Carnegie Endowment for International Peace, 27 Februari 2020.
- Moore, Cerwyn, and Chris Farrands. "International Relations Theory and Philosophy: Interpretive Dialogues." *International Relations Theory and Philosophy: Interpretive Dialogues* (2010): 1–212.

- Mr. Engel yang berjudul “Supporting the announcement of establishment of full diplomatic relations between the State of Israel and the Uni Arab Emirates and the State of Israel and the Kingdom of Bahrain, and for other purpose” *Journal Eliot L. Engel*, (14 September, 2020): 1-6.
- Nada, Garrett “Iran's Confrontation with Israel over Four Decades” *The Iran Primer*, 21 Januari 2020.
- Nainggolan, Poltak Partogi. Perang Drone dan Tanker di Timur Tengah, Info Singkat Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Vol. XI, No.15/I/Puslit/Agustus/2019: 7-12.
- Ng, Abigail “Middle East Leaders Praise Trump's 'Maximum Pressure' Campaign on Iran as Biden Takes Office,” *CNBC*, 22 Januari 2021.
- Norlen, Tova., dan Tamir Sinai, “The Abraham Accords: Paradigm Shift or Realpolitik?” *Security Insights*, The George C. Marshall European Center for Security Studies, ISSN 1867-4119 No. 64. Oktober, 2020.
- Prayuda, Rendi, Syafri Harto, and Desri Gunawan. “Politik Institusi Rezim Internasional (Konsep Dan Pendekatan Analisis).” *Journal of Diplomacy and International Studies* (2017): 97–111.  
<https://journal.uir.ac.id/index.php/jdis/index>.
- Rachmitha, Dewa Ayu. “Analisis Pembentukan Rezim Internasional EU-Turkey Refugee Agreement.” *Skripsi Hubungan Internasional, Universitas Islam Indonesia* 2507, no. February (2020): 1–9.
- Raine, John “Iran, Its Partners, and the Balance of Effective Force” *War on the Rocks*, 18 Maret 2020.
- Redondo, Raul “Iran Warns UAE over Disputed Islands near Strait of Hormuz” *Atalayar*, 6 Oktober 2020
- Rehman, Aziz Ur. “Causes behind the Abraham Accord and Its Consequences for the Peace Process in the Middle East.” *The Middle East International Journal for Social Sciences* 2, no. 2 (2020).
- Sabet, Farzan “How the Assassination of an Iranian Scientist Could Affect Nuclear Negotiations with Iran” *The Washington Post*, 11 Desember 2020.
- Satrianingsih, Andi., dan Zaenal Abidin, “Sejarah Zionisme dan Berdirinya Negara Israel,” *Jurnal Adabiyah* 16, No. 2 (2016), 174-175.
- Schultz, David “*American Foreign Policy in the Age of Donald Trump*”, *Journal Lithuanian Annual Strategic Review*, 2019. hal 13, diakses pada tanggal 29 Desember 2020.
- Seddik, Amira Elsayed Hassan. “Geopolitics of the Arab-Israeli Normalization.” *Journal of Afro Asian Studies* 2, no. 8 (2021).
- Shah, Hijab and Melissa Dalton “Evolving UAE Military and Foreign Security Cooperation: Path Toward Military Professionalism” *Carnegie Middle East Center*, 12 Januari 2021.
- Shah, Hijab., dan Melissa Dalton, "Kerja Sama Militer dan Keamanan Asing UEA yang Berkembang: Jalan Menuju Profesionalisme Militer," *Carnegie Middle East Center*, 12 Januari 2021

- Siahaan, Rivaldo Ganti Diolan. "Kedudukan Rezim Internasional Dalam Hukum Internasional Kontemporer (the Position of the International Regime in Contemporary International Law)." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 1 (2021): 59–65.
- Sinai, Tamir., and Tova Norlen "The Abraham Accords – Paradigm Shift or Realpolitik?". George C. Marshall European Center For Security Studies, Oktober 2020.
- Singer, Joel. "The Abraham Accords: Normalization Agreements Signed by Israel with the U.A.E., Bahrain, Sudan, and Morocco." *International Legal Materials* 60, no. 3 (2021).
- Snyder, Glenn. Balance of Power in the Missile Age, *Journal of International Affairs* 14, (1961): 21-24
- Stroul, Barbara A. Leaf and Dana "The F-35 Triangle: America, Israel, the United Arab Emirates," *War on the Rocks*, 15 September 2020.
- Telci, İsmail Numan "Israeli-Emirati Normalization and the Strategic Cooperation in Maritime and Aviation Sectors," *Al-Jazeera Centre For Studies* (2020): 2-9.
- Threat, Missile "Missiles of Iran, Missile Threat: CSIS Missile Defense Project (Center for Strategic and International Studies), 7 Maret 2021
- Triwahyuni, Dewi. Balance of Power: Perimbangan Kekuatan. <https://repository.unikom.ac.id/32156/1/BALANCE%20OF%20POWER.pdf>
- Triwahyuni, D. "International Regimes (Rezim Internasional)." <https://repository.unikom.ac.id/> 66, no. 3 (2010): 191–204. <https://link.springer.com/article/10.1007/BF00305621>.
- Ulrichsen, Kristian Coates "Israel and The Arab Gulf States: Drivers and Direction of Change", Center for The Middle East, September 2016.
- Wicaksono, Raden Mas Try Ananto Djoko "Analisis Kebijakan Uni Emirat Arab dalam Normalisasi Hubungannya dengan Israel," *Jurnal Middle East and Islamic Studies (MEIS)*, Volume 7, No.2 (2020): 2.
- Wicaksono, Raden Mas Try Ananto Djoko "Normalisasi Hubungan Uni Emirat Arab dengan Israel: Kepentingan Nasional Versus Solidaritas Negara Muslim terhadap Palestina," *Jurnal Indonesia Center for Middle East Studies (ICMES)*, Volume 4, No.2, (2020)
- Yee, Vivian "U.A.E. Becomes First Arab Nation to Open a Nuclear Power Plant" *The New York Times*, 1 Agustus 2020
- Wicaksono, Raden Mas Try Ananto Djoko. "Normalisasi Hubungan Uni Emirat Arab Dengan Israel: Kepentingan Nasional Versus Solidaritas Negara Muslim Terhadap Palestina." *ICMES* 4, no. 3 (2020).
- Zaga, Moran. "Israel and the United Arab Emirates : Opportunities on Hold." *Israel's Relations with Arab Countries: The Unfulfilled Potential*, no. December (2018).
- Zvyagelskaya, Irina D. "The Arab-Israeli Rapprochement: A Search for New





